



**PENGARUH PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAN PEMERINTAH  
KOTA BOGOR PERIODE 2011-2020**

**SKRIPSI**

Dibuat Oleh:

Novia Arifiyani  
0221 18 305

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2022**



**PENGARUH PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAN PEMERINTAH  
KOTA BOGOR PERIODE 2011-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.,)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAN PEMERINTAH  
KOTA BOGOR PERIODE 2011-2020**

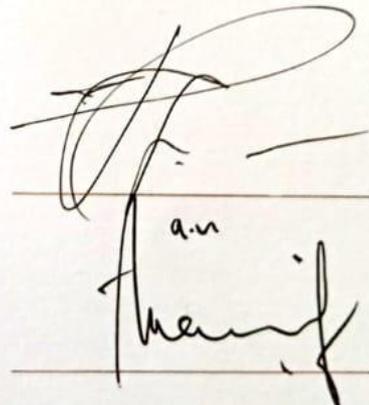
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, 27 Juli 2022

Novia Arifiyani  
022118305

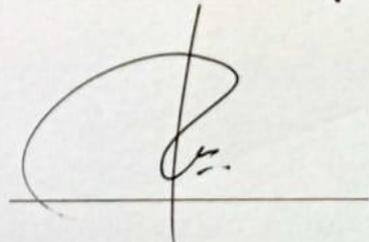
Disetujui,

**Ketua Penguji Sidang**  
(**Monang Situmorang**, Ak., M.M.,  
CA.)



Handwritten signature of Monang Situmorang, Ak., M.M., CA. The signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line. Below the line, the initials "a.u." are written in small black ink.

**Ketua Komisi Pembimbing**  
(**Satsangkaryon**, Drs., Ak., M.M.)



Handwritten signature of Satsangkaryon, Drs., Ak., M.M. The signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line.

**Anggota Komisi Pembimbing**  
(**Mutiara Puspa Widyowati**, SE., Ak.,  
M.Acc.)

## Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Arifiyani

NPM : 022118305

Judul Skripsi : Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun  
2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*



## ABSTRAK

NOVIA ARIFYANI, 022118305, Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020. Di bawah Bimbingan: SATSANGKARYON dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI, 2022.

Pemerintah daerah dituntut untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah masing-masing. hal ini akan mendorong penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) harus dikelola secara baik dan lebih profesional serta dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian. Indikator makro yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri diantaranya dilihat dari peningkatan jumlah penduduk. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dengan metode dokumentasi yang berasal dari *website* Badan Pusat Statistik Jawa Barat ([www.jabarbps.go.id](http://www.jabarbps.go.id)) periode 2011-2020. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik analisis regresi sederhana menggunakan *SPSS Ver. 22*.

Hasil analisis variabel penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan jumlah penduduk pada pemerintah Kabupaten Bogor lebih besar dibandingkan Pemerintah Kota Bogor. Tetapi jumlah penduduk mengalami penurunan pada periode 2020 Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor selalu mengalami kenaikan setiap periodenya kecuali pada periode 2015,2018 dan 2020 yang mengalami penurunan Hasil uji statistik menunjukkan, Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah.

## PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Banyak pihak yang memberikan bantuan dan dorongan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi penulis agar bisa menyusun skripsi sampai saat ini.
2. Kedua orang tua dan Kakak tercinta, yang selalu melimpahkan do'a, dukungan dan kasih sayang dari awal hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak. MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Satsangkaryon, Drs., Ak., M.M. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, SE., M.Acc., Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Monang Situmorang, Ak., M.M., C.A., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi.
10. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi
11. Seluruh Dosen, Staff TU dan jajarannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang sudah memberikan ilmunya dalam proses pembelajaran sampai skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Nidia, Desti, Ilmi, Nadia, Nana, Ghea, Tia, Mega, Seny, Caca yang selalu mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Dan terimakasih kepada seluruh teman, sahabat, dan orang-orang yang sudah mendukung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, izinkan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk mengoreksi dan melengkapi penelitian penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi yang berguna bagi kita semua, serta bisa menjadi tambahan literatur bagi penelitian berikutnya.

Bogor, Juli 2022  
Penulis,

Novia Arifiyani

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>PRAKATA .....</b>                                       | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                               | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                   |             |
| 1.1 Latar belakang Penelitian.....                         | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....       | 5           |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah .....                           | 5           |
| 1.2.2 Perumusan Masalah.....                               | 5           |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....                      | 5           |
| 1.3.1 Maksud Penelitian .....                              | 5           |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian.....                               | 5           |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....                               | 6           |
| 1.4.1 Kegunaan Praktis.....                                | 6           |
| 1.4.2 Kegunaan Akademis .....                              | 6           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                             |             |
| 2.1 Akuntansi Sektor Publik .....                          | 7           |
| 2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....              | 7           |
| 2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....                 | 7           |
| 2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik .. | 8           |
| 2.2 Otonomi Daerah.....                                    | 9           |
| 2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....                       | 9           |
| 2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah.....                           | 9           |
| 2.2.3 Indikator Otonomi Daerah .....                       | 10          |
| 2.3 Penduduk.....  | 11          |
| 2.3.1 Pengertian Penduduk.....                             | 11          |
| 2.3.2 Komponen Terbentuknya Pertumbuhan Penduduk .....     | 11          |
| 2.3.3 Teori Kependudukan.....                              | 12          |
| 2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                     | 13          |
| 2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....              | 13          |
| 2.4.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....        | 13          |
| 2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....     | 15          |
| 2.5.1 Penelitian Sebelumnya .....                          | 15          |
| 2.5.2 Kerangka Pemikiran.....                              | 20          |
| 2.6 Hipotesis Penelitian.....                              | 21          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                           |             |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                  | 22          |

|                                    |  |    |
|------------------------------------|--|----|
| 3.2                                | Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....  | 22 |
| 3.3                                | Jenis dan Sumber Data Penelitian .....   | 22 |
| 3.4                                | Operasionalisasi Variabel.....   | 22 |
| 3.5                                | Metode Penarikan Sampel.....   | 23 |
| 3.6                                | Metode Pengumpulan Data .....  | 23 |
| 3.7                                | Metode Analisis data.....  | 23 |
| 3.7.1                              | Uji Asumsi Klasik .....  | 24 |
| 3.7.2                              | Uji Hipotesis.....   | 25 |
| 3.7.3                              | Uji Analisis Regresi Sederhana.....  | 25 |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> |  |    |
| 4.1                                | Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 27 |
| 4.1.1                              | Sejarah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor .....   | 27 |
| 4.1.1.1                            | Sejarah Kabupaten Bogor .....  | 27 |
| 4.1.1.2                            | Sejarah Kota Bogor .....   | 28 |
| 4.1.2                              | Visi dan Misi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.....  | 29 |
| 4.1.2.1                            | Visi dan Misi Kabupaten Bogor .....  | 29 |
| 4.1.2.2                            | Visi dan Misi Kota Bogor.....  | 29 |
| 4.1.3                              | Geografis Kabupaten Bogor dan Kota Bogor .....   | 29 |
| 4.1.3.1                            | Geografis Kabupaten Bogor .....  | 29 |
| 4.1.3.2                            | Geografis Kota Bogor.....  | 30 |
| 4.1.4                              | Luas Wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.....   | 30 |
| 4.1.4.1                            | Luas Wilayah Kabupaten Bogor.....  | 30 |
| 4.1.4.2                            | Luas Wilayah Kota Bogor .....  | 31 |
| 4.1.5                              | Pemerintahan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.....   | 32 |
| 4.2                                | Analisis Variabel Penelitian .....   | 36 |
| 4.2.1                              | Analisis peningkatan jumlah penduduk Pemerintah<br>Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor ..... | 36 |
| 4.2.2                              | Tingkat pendapatan asli daerah Pada<br>Pemerintah Kabupaten Bogor.....                             | 38 |
| 4.2.3                              | Tingkat pendapatan asli daerah Pada<br>Pemerintah Kota Bogor .....                                 | 40 |
| 4.2.4                              | Analisis pengaruh peningkatan jumlah penduduk<br>Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) .....       | 41 |
| 4.3                                | Analisis Data .....  | 44 |
| 4.3.1                              | Uji Asumsi Klasik .....  | 44 |
| 4.3.2                              | Uji Hipotesis.....   | 50 |
| 4.3.3                              | Analisis Regresi Linier Sederhana .....  | 53 |
| 4.4                                | Pembahasan.....  | 54 |
| 4.5                                | Interpretasi Hasil Penelitian .....  | 55 |
| 4.5.1                              | Pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap<br>pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bogor ..... | 56 |
| 4.5.2                              | Pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap  |    |

|   |    |
|---|----|
| pendapatan asli daerah pada Kota Bogor..... | 56 |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>           |    |
| 5.1 Kesimpulan .....                        | 58 |
| 5.2 Saran.....                              | 59 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                       |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                 |    |
| <b>LAMPIRAN</b>                             |    |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1  | Pendapatan asli daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020 ..... | 2  |
| Tabel 1.2  | <i>Research Gap</i> jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah .....                                      | 4  |
| Tabel 2.1  | Penelitian Sebelumnya.....   | 15 |
| Tabel 3.1  | Operasionalisasi Variabel .....  | 23 |
| Tabel 4.1  | Peningkatan Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020 .....  | 36 |
| Tabel 4.2  | Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2011-2020 .....                                 | 39 |
| Tabel 4.3  | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020 .....                                | 40 |
| Tabel 4.4  | Hasil Uji Normalitas Pemerintah Kabupaten Bogor.....   | 44 |
| Tabel 4.5  | Hasil Uji Normalitas Pemerintah Kota Bogor .....   | 45 |
| Tabel 4.6  | Hasil Uji Multikolinearitas Pemerintah Kabupaten Bogor.....  | 47 |
| Tabel 4.7  | Hasil Uji Multikolinearitas Pemerintah Kota Bogor .....  | 47 |
| Tabel 4.8  | Hasil Uji Glesjser Pemerintah Kabupaten Bogor .....  | 48 |
| Tabel 4.9  | Hasil Uji Glesjser Pemerintah Kota Bogor .....   | 49 |
| Tabel 4.10 | Hasil Uji Autokorelasi Kabupaten Bogor .....   | 49 |
| Tabel 4.11 | Hasil Uji Autokorelasi Kota Bogor .....  | 50 |
| Tabel 4.12 | Rekapan nilai d, dL dan dU .....   | 50 |
| Tabel 4.13 | Hasil Uji Koefisien Determinasi Kabupaten Bogor .....  | 51 |
| Tabel 4.14 | Hasil Uji Koefisien Determinasi Kota Bogor .....   | 51 |
| Tabel 4.15 | Hasil Uji Parsial (Uji t) Kabupaten Bogor.....   | 52 |
| Tabel 4.16 | Hasil Uji Parsial (Uji t) Kota Bogor .....   | 52 |
| Tabel 4.17 | Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Kabupaten Bogor.....  | 53 |
| Tabel 4.18 | Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Kota Bogor .....  | 54 |
| Tabel 4.19 | Hasil Pengujian Hipotesis .....  | 54 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1  | Jumlah penduduk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor<br>Periode 2011-2020 .....   | 2  |
| Gambar 2.1  | Kerangka Pemikiran.....   | 21 |
| Gambar 4.1  | Wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor.....   | 31 |
| Gambar 4.2  | Wilayah Pemerintah Kota Bogor .....   | 31 |
| Gambar 4.3  | Struktur perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bogor<br>dan Kota Bogor .....  | 32 |
| Gambar 4.4  | Grafik Peningkatan jumlah penduduk Pada Pemerintah<br>Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor<br>Periode 2011-2020 .....    | 38 |
| Gambar 4.5  | Grafik Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah<br>Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor<br>periode 2011-2020 ..... | 41 |
| Gambar 4.6  | Grafik Persentase dari PAD dan Peningkatan Jumlah Penduduk<br>pada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2011-2020 .....         | 42 |
| Gambar 4.7  | Grafik Persentase dari PAD dan Peningkatan Jumlah Penduduk<br>pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.....               | 42 |
| Gambar 4.8  | Hasil Uji Normalitas Histogram- PAD dan Normal<br>Probabillity Plot PAD Pemerintah Kabupaten Bogor .....                      | 44 |
| Gambar 4.8  | Hasil Uji Normalitas Histogram- PAD dan Normal<br>Probabillity Plot PAD Pemerintah Kota Bogor .....                           | 45 |
| Gambar 4.9  | Hasil Uji Heteroskedasitas Pemerintah Kabupaten Bogor .....   | 48 |
| Gambar 4.10 | Hasil Uji Heteroskedasitas Pemerintah Kota Bogor .....  | 48 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2011-2015 .....           | 64 |
| Lampiran 2 | Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020 .....           | 66 |
| Lampiran 3 | Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2015 .....                | 67 |
| Lampiran 4 | Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Bogor Periode 2016-2020 .....                | 69 |
| Lampiran 5 | Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020 ..... | 70 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

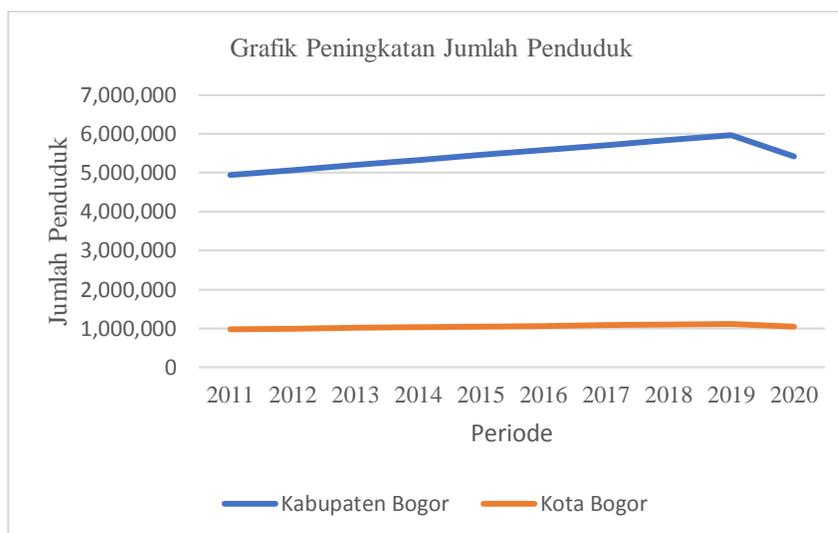
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur serta mengurus pemerintahan daerahnya masing-masing. Dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki daerah otonom dapat digunakan untuk menggali sumber keuangan daerahnya sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin (Nurmiati dkk, 2019). Dalam melaksanakan otonomi daerah diperlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber keuangan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan daerahnya baik dari segi pembangunan maupun perekonomian (Ariyani dkk,2018).

Indikator makro yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri diantaranya dilihat dari peningkatan jumlah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2021). Jumlah penduduk memiliki peranan terhadap pemerintah daerah, yang mana sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menyebabkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut semakin baik, ketika usaha semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi (Juliansyah,2018).

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menyebabkan proporsi jumlah penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, berarti semakin banyak diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi, sehingga dapat menambah pendapatan perkapita daerah tersebut. Secara umum pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan konsumsinya, sehingga terdapat kelebihan yang bisa ditabung untuk menjadi sumber devisa dana investasi (Syahrain R, 2019).

Berikut grafik yang menunjukkan tingkat jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor:



(Sumber: jabar.bps.go.id, data diolah tahun 2022)

Gambar 1.1

Peningkatan Jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat peningkatan jumlah penduduk dengan sumbu x yang merupakan periode dari 2011-2020 sedangkan sumbu y merupakan jumlah penduduk dalam jutaan jiwa. Terlihat grafik yang berwarna biru untuk Pemerintah Kabupaten Bogor dan grafik berwarna jingga untuk Pemerintah Kota Bogor. Dari kedua grafik tersebut terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan disebabkan oleh pandemik covid-19. Terlihat juga bahwa tingkat jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten Bogor lebih besar dibandingkan Pemerintah Kota Bogor.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang di peroleh suatu daerah yang dipungut dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan dari PAD diantaranya yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah otonom dalam menggali potensi daerah masing-masing.

Pada realitanya, besar kecilnya potensi yang dimiliki daerah, tidak dapat selalu dijadikan tolak ukur untuk memperoleh PAD yang tinggi. Hal ini bergantung pada bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya (Ardian, 2020). Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang termasuk tinggi di Indonesia adalah Pemerintah Kabupaten Bogor

(Kusnandar, 2018). Sedangkan Pemerintah Kota Bogor tergolong lebih kecil jika dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor tetapi cukup signifikan dalam daerah yang luas wilayahnya kecil (Kintan, 2019). Untuk lebih jelasnya terkait pendapatan asli daerah, berikut rincian pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor beserta kontribusinya terhadap pendapatan daerah dalam periode sepuluh tahun terakhir.

Tabel 1.1  
Pendapatan asli daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020  
(dalam jutaan rupiah)

| Tahun | Kabupaten Bogor | Kota Bogor  |
|-------|-----------------|-------------|
|       | PAD<br>(Rp)     | PAD<br>(Rp) |
| 2011  | 685.121         | 230.450     |
| 2012  | 1.068.548       | 252.281     |
| 2013  | 1.261.035       | 463.368     |
| 2014  | 1.712.937       | 544.836     |
| s2015 | 1.656.291       | 617.062     |
| 2016  | 2.299.863       | 783.874     |
| 2017  | 3.041.872       | 977.804     |
| 2018  | 2.794.724       | 912.198     |
| 2019  | 3.161.166       | 1.015.884   |
| 2020  | 2.292.880       | 812.017     |

(Sumber: jabar.bps.go.id, data diolah tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan PAD kedua daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2011-2020) mengalami fluktuasi (peningkatan dan penurunan). Seperti yang terlihat dalam tabel, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bogor mengalami penurunan PAD yang disebabkan oleh penerimaan pajak yang turun sangat besar dari tahun sebelumnya (Ningsih, 2016). Sedangkan Pemerintah Kota Bogor sebaliknya yakni tahun 2015 terjadi peningkatan PAD. Pada 2018 Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor mengalami penurunan PAD, hal ini disebabkan karena pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen. Dari 82 kota IHK (Indeks Harga Konsumen), 80 kota mengalami inflasi termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor (BPS,2018). Dalam tabel juga terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan yang merupakan dampak dari pandemik covid-19.

Besar kecilnya PAD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemerintah sebagai pengatur kebijakan, pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja) dan masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen (Kuncoro, 2010). Ketika Jumlah penduduk disuatu wilayah tinggi maka dapat meningkatkan produktivitas dari segi

permintaan terhadap barang dan jasa yang berimbas juga pada meningkatnya lapangan usaha yang terdiri dari sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri, sektor pertanian dan lain sebagainya yang masuk kedalam PDRB, dari kegiatan perekonomian tersebut yang didalamnya terdapat proses-proses transaksi pembayaran antar penduduk sebagai konsumen dan produsen, dan harga yang sudah ditentukan tersebut sudah termasuk pajak untuk daerah. Pajak daerah yakni kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Semakin berjalan kegiatan perekonomian di suatu daerah maka akan menghasilkan pemasukan berupa pajak daerah yang semakin meningkat yang mana dapat juga mendorong penerimaan pendapatan asli daerah (Ardian, 2020).

Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu mengindikasikan perbedaan hasil penelitian atau *research gap* dari satu variabel independen Jumlah Penduduk yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2  
*Research Gap* Peningkatan Jumlah penduduk Terhadap Pendapatan asli daerah

|  | Hasil Penelitian  | Peneliti   |
|--|---|--|
| Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap PAD | Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa.        | Afifah Ariyani, Fitri Yetti dan Noegrahini Lastiningsih (2018) |
|  | Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Simeuleu. | Hijri Juliansyah, Sulkadria (2018)                             |

Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah yang diteliti oleh Afifah Ariyani, Fitri Yetti dan Noegrahini Lastiningsih (2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hijri Juliansyah, Sulkadria (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan data yang ada, Pada tahun 2018, pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terlihat jumlah penduduk mengalami peningkatan tetapi

sebaliknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Dalam sepuluh tahun terakhir juga dapat dikatakan PAD baik pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor mengalami fluktuasi. Padahal berdasarkan beberapa penelitian terdahulu peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dengan judul **“Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi bahwa jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) justru mengalami penurunan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Untuk melakukan pengujian dan menjelaskan adanya keterkaitan antara peningkatan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020. Serta dapat menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran yang dapat dijadikan solusi untuk permasalahan tersebut.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.

2. Untuk menguji pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan faktor-faktor yang berpengaruh untuk kebijakan-kebijakan pengelolaan daerah khususnya untuk Pendapatan asli daerah yang diterima.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah demi kemajuan daerah tersebut.

##### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP).
2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademis mengenai pendapatan asli daerah (PAD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) istilah “sektor publik” memiliki definisi yang bermacam-macam, hal ini berkaitan dengan konsekuensi dari luasnya wilayah publik. Sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, sosial, politik dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2014) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dari definisi-definisi diatas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi berupa proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta

##### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan tujuan akuntansi sektor publik antara lain:

1. Pengendalian Manajemen (*management control*).  
Memberikan informasi yang dibutuhkan, agar dapat dikelola secara tepat, efisien, serta ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Akuntabilitas (*accountability*)  
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan, tanggung jawab dalam pengelolaan program yang secara tepat serta efektif program, melaporkan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil kinerja pemerintah serta penggunaan dana publik.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi publik. Informasi akuntansi bermanfaat dalam pengambilan keputusan, menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Selain itu, informasi akuntansi juga digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi.

### **2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik**

Komponen yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah di dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos dalam Laporan SAL, sebagai berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang dan Ekuitas dana dikelompokkan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.
4. Laporan Operasional  
Laporan operasional menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan tersebut. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
5. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2.2 Otonomi Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Mardiasmo (2018) Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerahnya sendiri dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah antara lain:

#### 1. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan umum secara maksimal kepada masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

#### 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan. Semakin baik pengelolaan daerah otonom tersebut semakin sejahtera masyarakat didaerahnya.

### 3. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta keistimewaan daerah tertentu.

## 2.2.3 Indikator Otonomi Daerah

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat ditentukan dengan indikator yang meliputi empat faktor, yaitu:

### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, Pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

### b. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya, yang terdiri dari:

- a) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- c) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

### d. Peralatan

Faktor peralatan merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.

### e. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan secara baik, efisien, dan efektif.

## **2.3 Penduduk**

### **2.3.1 Pengertian Penduduk**

Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Asmuruf (2015) Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili di suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencarian tetap pada daerah tersebut serta tercatat dengan sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **2.3.2 Komponen Terbentuknya Pertumbuhan Penduduk**

Menurut Mulyadi (2017) Pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk, komponen tersebut meliputi fertilitas, mortalitas dan migrasi.

#### **a. Fertilitas**

Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita atau dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu negara adalah fertilitas. Peningkatan atau penurunan fertilitas dapat mencerminkan kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara.

#### **b. Moralitas**

Kematian atau moralitas merupakan salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Tinggi rendahnya tingkat moralitas penduduk disuatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

#### **c. Migrasi**

Migrasi merupakan bentuk perpindahan penduduk yang memiliki tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengertian migrasi yaitu suatu perubahan tempat tinggal dari satu unit administrasi ke unit administrasi lain secara permanen. Dalam

kaitannya dengan sumber daya manusia yakni umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti menyangkut lapangan dan jenis pekerjaan serta alasan lain seperti keamanan.

### 2.3.3 Teori Kependudukan

#### a. Aliran Malthusian

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “*Essay On Population*”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus ini, terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang.

Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

#### b. Aliran Marxist (Karl dan F. Angel)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk disuatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang di hasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

#### c. Aliran Neo-Malthusian (Garreth Hardin dan Paul Ehrlich)

Pada abad 20, teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara “Preventif Check” yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960-an dan 1970-an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas yang pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Tahun 1871 Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian di revisi menjadi “*The Population Explosion*” yang berisi:

- 1) Sudah Terlalu banyak manusia di bumi ini.
- 2) Keadaan bahan makanan sangat terbatas.

- 3) Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

## **2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang di peroleh suatu daerah yang dipungut dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yunus (2021), Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### **2.4.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 menjelaskan bahwa sumber penerimaan pendapatan asli daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan instansi pemungut, Pajak Daerah terbagi menjadi:

Pajak Provinsi, yang meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak Air Tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, Pengertian Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 108 ada tiga, yaitu:

### a. Jasa Umum

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 109, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

### b. Jasa Usaha

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 126, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

### c. Perizinan Tertentu

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 140, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2014) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang No 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah
- Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - e. Komisi atau potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
  - f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
  - h. Pendapatan denda pajak.
  - i. Pendapatan denda retribusi.
  - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
  - k. Pendapatan dari pengembalian.
  - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
  - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
  - n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## 2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1  
Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|----|---|------------------------|-----------|-----------------|------------------|
|    |   |                        |           |                 |                  |

|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| 1 | Demitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolosang (2018) Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB terhadap PAD di Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua. | Jumlah Penduduk (X1), Pendapatan Perkapita (X2), Produk domestik regional bruto (PDRB) (X3), Pendapatan asli daerah (Y) | X1: Rasio pertumbuhan penduduk<br>X2: Tingkat pendapatan masyarakat<br>X3: Rasio pertumbuhan PDRB<br>Y: -Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah  | Metode analisis data menggunakan analisis simultan, dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik.           | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan PDRB tidak memiliki pengaruh.   |
| 2 | Muh Ikram Idrus dan Irma (2017) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Makassar.                                    | Pengeluaran pemerintah (X1), Jumlah penduduk (X2), Pendapatan asli daerah (Y)   | X1: Anggaran pengeluaran pemerintah<br>X2: Rasio pertumbuhan penduduk<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah                               | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. |
| 3 | Afifah Ariyani, Fitri Yetti, dan Noegrahini Lastiningsih (2018) Pengaruh Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).      | PDRB (X1), Jumlah penduduk (X2), Pajak hotel (X3), dan Pendapatan asli daerah (Y).                                      | X1: Rasio pertumbuhan PDRB,<br>X2: Rasio pertumbuhan penduduk,<br>X3: Rasio pertumbuhan pajak hotel<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk domestik regional bruto (PDRB), Jumlah penduduk, dan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) baik Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa.           |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| 4 | Hijri Juliansyah, Sulkadria (2018) Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeuleu.                                   | Total penduduk (X1), PDRB (X2), dan Pendapatan asli daerah (Y)   | X1: Rasio pertumbuhan penduduk<br>X2: Rasio pertumbuhan PDRB<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah  | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik.  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Simeuleu sedangkan Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Simeuleu.  |
| 5 | Aliman Syahuri Zein (2018) Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.  | Jumlah penduduk (X1), Pengeluaran pemerintah (X2) dan Pendapatan asli daerah (Y)   | X1: Rasio pertumbuhan penduduk<br>X2: Anggaran pengeluaran pemerintah<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah   | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik.  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara.   |
| 6 | Idham Nur Iman, Ima Amaliah dan Meidy Hayiz (2019) Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017 | Jumlah penduduk (X <sub>1</sub> ), PDRB (X <sub>2</sub> ), Belanja daerah (X <sub>3</sub> ) dan Pendapatan asli daerah (Y) | X <sub>1</sub> : Rasio pertumbuhan penduduk<br>X <sub>2</sub> : Rasio pertumbuhan PDRB, X <sub>3</sub> : Rasio pertumbuhan belanja daerah<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah | Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Dilakukan juga pengujian hipotesis dan asumsi klasik. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bandung, sedangkan Belanja Daerah kecil pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bandung. |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 7 | Caesar Muslim, Syahrir Mallongi dan Zainuddin Rahman (2019) Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kendari                          | PDRB (X1), Jumlah penduduk (X2), Tingkat inflasi (X3), Pendapatan asli daerah (Y)                        | X1: Rasio pertumbuhan ekonomi<br>X2: Rasio pertumbuhan penduduk<br>X3: Tingkat inflasi<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah                            | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik.       | Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari. Jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2012-2017. |
| 8 | Gufron Reynaldinn Sunandar (2017) Analisis pengaruh PDRB, Pengeluaran pemerintah, Jumlah penduduk dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Pemrintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014) | PDRB (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Jumlah Penduduk (X3), Investasi (X4), Pendapatan asli daerah (Y) | X1: Rasio pertumbuhan PDRB<br>X2: Anggaran Pengeluaran<br>X3: Rasio Pertumbuhan penduduk<br>X4: Tingkat investasi<br>Y: Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah | Metode analisis menggunakan model persamaan regresi linear berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik. | Penelitian ini menemukan bahwa hasil dari pengujian statistik ternyata semuanya mendukung hipotesis yang ada. Bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PAD.  |
| 9 | Asdar dan Niadah (2020) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | Jumlah penduduk (X1), Pengeluaran pemerintah (X2), Pendapatan asli daerah (Y)                            | X1: Rasio pertumbuhan penduduk<br>X2: Anggaran pengeluaran pemerintah  | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik.       | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan  |

|    |   |   |   |  |  |
|----|---|---|---|--|--|
|    | Pemerintah Kota Makassar  |   | Y:<br>Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah  |  | asli daerah di Kota Makassar.  |
| 10 | Andi Hakib, Arifin dan Zainuddin Rahman (2020) Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASAT A | Konsumsi rumah tangga (X1), Jumlah penduduk (X2), Pengeluaran pemerintah (X3), Pendapatan asli daerah (Y) | X1:<br>Tingkat konsumsi masyarakat<br>X2:<br>Rasio pertumbuhan penduduk<br>X3:<br>Anggaran pengeluaran pemerintah<br>Y:<br>Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Wilayah MAMINASATA. |
| 11 | Matius Liaran (2021) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Mappi  | PDRB (X1), Jumlah penduduk (X2), Inflasi (X3), Pendapatan asli daerah (Y)                                 | X1:<br>Rasio pertumbuhan PDRB<br>X2:<br>Rasio pertumbuhan penduduk<br>X3:<br>Tingkat Inflasi<br>Y:<br>Rasio kemandirian Pendapatan asli daerah                      | Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.   |

Penelitian ini memiliki persamaan dengan semua peneliti terdahulu yaitu menggunakan variabel peningkatan jumlah penduduk untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD) dengan metode analisis regresi sederhana. Namun, terdapat perbedaan dalam objek penelitian dan periode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

### **2.5.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan kerangka teoritis yang menunjukkan alur berpikir penelitian untuk melandasi pemahaman-pemahaman lainnya.

#### **1. Peningkatan jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Ketika Jumlah penduduk disuatu wilayah tinggi maka dapat meningkatkan produktivitas dari segi permintaan terhadap barang dan jasa yang berimbas juga pada meningkatnya lapangan usaha yang terdiri dari sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri, sektor pertanian dan lain sebagainya yang masuk kedalam PDRB, dari kegiatan perekonomian tersebut yang didalamnya terdapat proses-proses transaksi pembayaran antar penduduk sebagai konsumen dan produsen, dan harga yang sudah ditentukan tersebut sudah termasuk pajak untuk daerah. Pajak daerah yakni kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Semakin berjalan kegiatan perekonomian di suatu daerah maka akan menghasilkan pemasukan berupa pajak daerah yang semakin meningkat yang mana dapat juga mendorong penerimaan pendapatan asli daerah (Ardan, 2020).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diatas, hasil dari variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Peningkatan Jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

H<sub>2</sub>: Peningkatan Jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bogor.

Dari beberapa uraian teori ahli diatas, dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



## 2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari paparan diatas maka hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- H<sub>1</sub> : Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor.
- H<sub>2</sub> : Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bogor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan antara variable independen yaitu peningkatan jumlah penduduk terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.

Penelitian kuantitatif ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel dengan cara melakukan pengujian dengan aplikasi pengolahan statistik yaitu SPSS.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian yang penulis teliti adalah Peningkatan Jumlah Penduduk (X) dan Pendapatan Asli Daerah (Y). Unit Analisis yang digunakan adalah Geografis regional (*Geographic region*). Geographic Regional adalah wilayah/daerah/negara, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respons) suatu wilayah/daerah/negara tertentu. Lokasi penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Menurut Siregar (2013) Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik.

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sujarweni (2014) data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Adapun data sekunder dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dapat dari *website* publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat ([www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id))

#### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Operasional variabel digunakan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrument penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (variabel independen) yang mencakup Peningkatan Jumlah Penduduk (X) sedangkan variabel terikat (variabel dependen) adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel

| No | Variabel                                      | Indikator                                  | Ukuran  | Skala |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | Independen (X)<br>Peningkatan Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk total dalam satu wilayah   | Jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik                  | Rasio |
| 2. | Dependen (Y)<br>Pendapatan Asli Daerah        | Pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun | Realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik | Rasio |

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel. Meskipun tidak menggunakan penarikan sampel, penulis tetap mengambil dan mengolah data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang diteliti.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder yaitu berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor bersumber pada BPS Provinsi Jabar ([www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)). Laporan realisasi anggaran ini diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk di peroleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar ([www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id))

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dengan bantuan oleh data SPSS Versi 22. Analisis data dalam penelitian ini dengan langkah-langkah yaitu Uji asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Analisis Regresi Sederhana.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan tabel Test of Normality dengan melihat kolom Kolmogorov Smirnov, apabila nilai  $\text{Sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal. Selain itu hasil uji normalitas dapat dibuktikan dengan analisis grafik antara lain menggunakan histogram dan *probability plot* dengan melihat penyebaran titik-titik terdistribusi secara normal.

#### 3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variante inflation factor* (VIF), jika nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan nilai VIF  $\leq 10$  menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas pada antar variabel independen.

#### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016) memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi linier apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadinya Homoskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas melalui dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian ini akan menggunakan uji durbin-watson dengan membandingkan nilai durbin Watson hitung (d) dan nilai durbin-

watson tabel, yaitu batas atas (dU) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Bila  $d < dL$ , berarti ada korelasi yang positif.
- Bila  $dL \leq d \leq dU$ , berarti tidak dapat disimpulkan.
- Bila  $dU \leq d \leq 4-dU$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila  $4-dU \leq d \leq 4-dL$ , berarti tidak dapat disimpulkan.
- Bila  $d > 4-dL$ , berarti ada korelasi yang negatif.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 3.7.3.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R<sup>2</sup>*)

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu yaitu  $0 < R^2 < 1$ . Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependennya amat terbatas. Sedangkan jika nilai koefisien determinasinya mendekati satu maka variabel independen memberikan variasi variabel dalam dependen. Pengukuran Adjusted  $R^2$  digunakan dalam penelitian ini karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi.

#### 3.7.3.2 Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$  dan nilai t hitung  $< t$  tabel, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$  dan nilai t hitung  $> t$  tabel, maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.7.4 Analisis Regresi Linier sederhana

Adapun bentuk model regresi linier sederhana ini yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Jumlah Penduduk  
 $e$  = error

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor tahun 2011-2020 dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai mana telah dijelaskan dalam BAB III.

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor**

###### **4.1.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Bogor**

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya. Penggalan untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukahati.

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Perjalanan sejarah Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat menginstruksikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kotamadya Bogor. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi, Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang

menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari Penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau.

#### **4.1.1.2 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bogor**

Dalam tulisan berjudul *De Batoe Toelis te Buitenzorg*, Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. Pakuan mengandung pengertian “paku”, akan tetapi harus diartikan “paku jagat” yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Yang dimaksudkan Rouffaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit.

Sekalipun Rouffaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti “Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit”. Dalam tulisan *De Batoe-Toelis bij Buitenzorg* ia menjelaskan bahwa kata “Pakuan” mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno “pakwan” yang kemudian dieja “pakwan”. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti “istana yang berjajar”. Dalam tulisannya, Verkenningen Rondon Padjajaran, pengertian “Pakuan” ada hubungannya dengan “lingga” batu yang terpancang di sebelah prasasti Batutulis sebagai tanda kekuasaan.

Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuktunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian “paku”. “Pakuan” bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibukota yang harus dibedakan dari keraton. Ia merujuk laporan Kapiten Wikler yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tangerang. Dalam naskah Carita Parahiyangan ada kalimat berbunyi “Sang Susuktunggal, inyana nu nyieunna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata” Sang Susuktunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana.

Jadi yang disebut “pakuan” itu adalah “kadaton” yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Jadi tafsiran Poerbatjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam Carita Parahiyangan, yaitu “istana yang berjajar”. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik “panca persada”. Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran

## **4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor**

### **4.1.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor**

- Visi Pemerintah Kabupaten Bogor

Mewujudkan Kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban.

- Misi Pemerintah Kabupaten Bogor
  1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
  2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
  3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.
  4. Mewujudkan kesalehan sosial.
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

### **4.1.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor**

- Visi Pemerintah Kota Bogor

Mewujudkan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga.

- Misi Pemerintah Kota Bogor
  1. Mewujudkan Kota yang Sehat;
  2. Mewujudkan Kota yang Cerdas;
  3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

## **4.1.3 Geografis**

### **4.1.3.1 Geografis Pemerintah Kabupaten Bogor**

Secara geografis wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor terletak di antara 6°18'0" – 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" – 107°13'30" Bujur Timur, dengan tipemorfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100 – 500meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 - 1.000meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000meter pl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 – 2.500meter dpl, merupakan kategori hulu.

Selain itu, kondisi morfologi Pemerintah Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relative rawan terhadap gerakan tanah bila

mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah tahunan 2.500 – 5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25°. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

#### **4.1.3.2 Geografis Pemerintah Kota Bogor**

Secara geografis Pemerintah Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

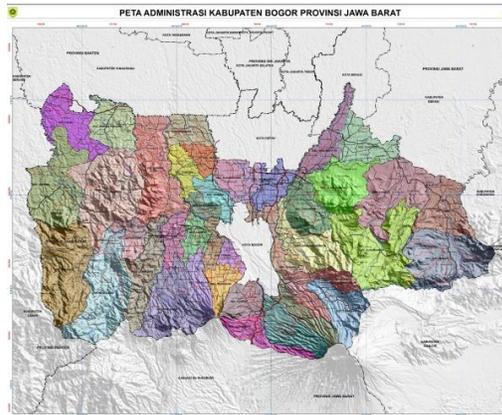
Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

#### **4.1.4 Luas Wilayah**

##### **4.1.4.1 Luas Wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor**

Wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki luas + 298.838,304 Ha. Pada tahun 2012 telah dibentuk 4 (empat) desa baru, yaitu Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya serta Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin. Pemerintah Kabupaten Bogor secara administrasi terdiri dari 436 desa/kelurahan (417 desa dan 19 kelurahan), dengan jumlah 3.941 RW dan 15.874 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Luas wilayah terbesar di Kecamatan Cigudeg seluas 17.726,24 Ha, yang terdiri dari 15 desa dan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ciomas yang memiliki luas 1.810,36 Ha, yang terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan.

- a) Utara: Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi.
- b) Barat: Kabupaten Lebak (Provinsi Banten)
- c) Timur: Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur
- d) Selatan: Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
- e) Tengah: Kota Bogor

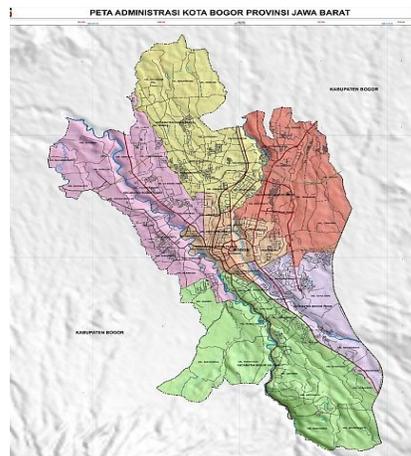


Gambar 4.1  
Wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor

#### 4.1.4.2 Luas Wilayah Pemerintah Kota Bogor

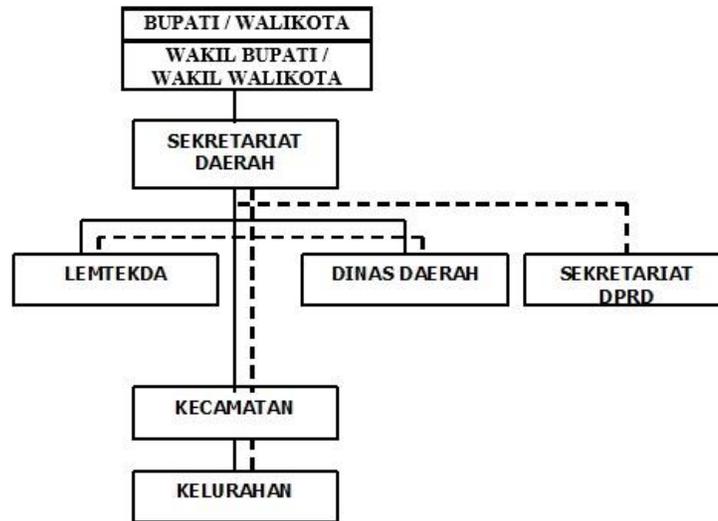
Luas Wilayah Pemerintah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

- a) Utara: Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b) Barat: Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- c) Timur: Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- d) Selatan: Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.



Gambar 4.2  
Wilayah Pemerintah Kota Bogor

#### 4.1.5 Pemerintahan Kabupaten Bogor dan Pemerintahan Kota Bogor



Gambar 4.3

Struktur perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor

Tugas Pokok, Kedudukan dan fungsi masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Bupati/Walikota mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
2. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menghormati kedaulatan rakyat.
4. Menegakan seluruh peraturan perundangan.
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah Bersama DPRD.

Wakil Bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati/Walikota dalam menjalankan kewajibannya.
2. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota bogor.

2. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati/Walikota dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoodinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah daerah.
4. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah.
7. Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah.
8. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD.
  2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.
  3. Penyelenggaraan tata usaha DPRD.
  4. Pengkajian produk peraturan perundangan.
  5. Penyelenggaraan hubungan antar Lembaga dan kemasyarakatan.
- ### 4. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

2. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati/Walikota.
  3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.
  5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Dinas/Badan Daerah

Dinas/Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas/Badan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas/Badan dan cabang Dinas/Badan.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Dinas Ketahanan Pangan
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
15. Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

20. Dinas Peternakan dan Perikanan
21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23. Dinas Arsip dan Perpustakaan
24. Satuan Polisi Pamong Praja
25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Daerah Terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kecamatan
- Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati/Walikota. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa.
  2. Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.
  3. Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.
  4. Penyelenggaraan pelayanan umum.
  5. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
  6. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Kelurahan
- Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Camat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kelurahan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
  2. Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan keteritatan wilayah,
  3. Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kelurahan,
  4. Penyelenggaraan pelayanan umum; dan

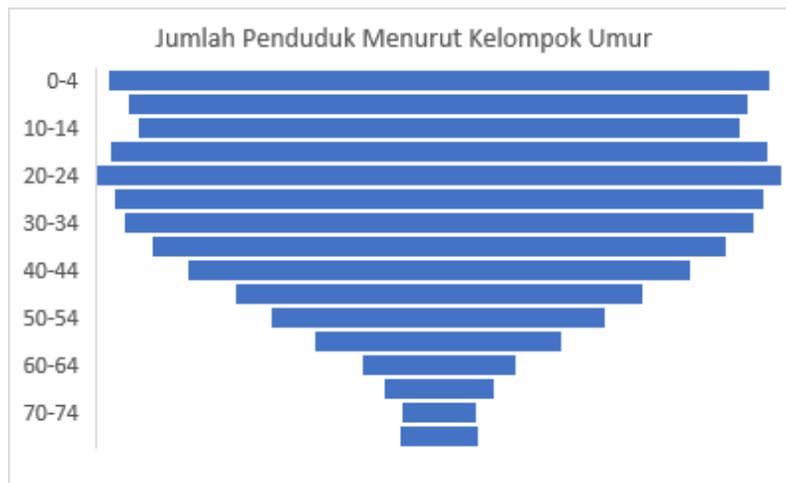
5. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

#### 4.2 Analisis Variabel Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

##### 4.2.1 Analisis Peningkatan Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan salah satu pemerintah daerah yang jumlah penduduk dalam wilayahnya termasuk dalam kategori besar. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk yang meningkat tahunnya. Berikut ini Jumlah Penduduk menurut kelompok umur pada Pemerintah Kabupaten Bogor



##### 4.2.1 Analisis Peningkatan Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor

Penduduk merupakan unsur yang berperan sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penduduk merupakan penggerak aktivitas perekonomian yang berlangsung. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan menambah adanya tenaga kerja. Dengan bekerja, maka akan menambah pendapatan dan juga penduduk akan banyak memakai fasilitas yang disediakan pemerintah, sehingga penduduk juga akan membayar pajak yang ditetapkan (Ardan, 2020). Berikut data jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor pada periode 2011-2020.

Perkembangan peningkatan jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020 serta tingkat kenaikannya per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Peningkatan Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020  
(dalam satuan jiwa)

| Tahun | Jumlah Penduduk                   |  |                              |  |
|-------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|       | Pemerintah Kabupaten Bogor (Jiwa) | Persentase (Naik/Turun) (Dalam persen) | Pemerintah Kota Bogor (Jiwa) | Persentase (Naik/Turun) (Dalam persen) |
| 2011  | 4.943.746                         | 2,63                                   | 976.791                      | 1,92                                   |
| 2012  | 5.073.116                         | 2,55                                   | 995.081                      | 1,84                                   |
| 2013  | 5.202.097                         | 2,48                                   | 1.013.019                    | 1,77                                   |
| 2014  | 5.331.149                         | 2,42                                   | 1.030.720                    | 1,72                                   |
| 2015  | 5.459.668                         | 2,35                                   | 1.047.922                    | 1,64                                   |
| 2016  | 5.587.390                         | 2,29                                   | 1.064.687                    | 1,57                                   |
| 2017  | 5.715.009                         | 2,23                                   | 1.081.009                    | 1,51                                   |
| 2018  | 5.840.907                         | 2,16                                   | 1.096.828                    | 1,44                                   |
| 2019  | 5.965.410                         | 2,09                                   | 1.112.081                    | 1,37                                   |
| 2020  | 5.427.068                         | -9,92                                  | 1.043.070                    | -6,62                                  |

(Sumber: jabar.bps.go.id, data diolah tahun 2022)

Peningkatan jumlah penduduk (dalam persen) dapat dihitung menggunakan rumus geometri sebagai berikut:

$$r = \left( \frac{Pt}{Po} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Keterangan:

r = Peningkatan jumlah penduduk (dalam persen)

Pt = Jumlah Penduduk tahun t

Po = Jumlah Penduduk tahun awal

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

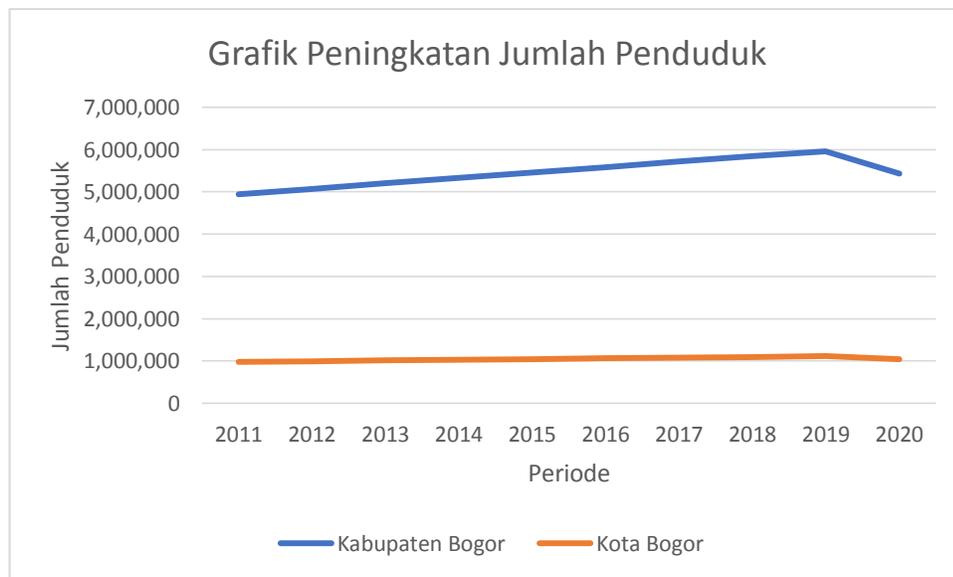
Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan Peningkatan jumlah penduduk (dalam persen) untuk Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam tabel 4.1.

Pada tabel 4.1 Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten Bogor cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 jumlah

penduduk mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh pandemik covid-19, pada tahun 2019 jumlah penduduk pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 5.965.410 jiwa sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5.427.068 jiwa yang artinya untuk pemerintah Kabupaten Bogor mengalami penurunan penduduk sebesar 538.342 jiwa atau persentase penurunan sebesar -9,92%.

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bogor memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih rendah angkanya dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Tetapi dilihat dari tabel 4.1 Pemerintah Kabupaten Bogor tingkat jumlah penduduknya juga cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali tahun 2020 mengalami penurunan sama seperti halnya pemerintah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2019 jumlah penduduk pemerintah Kota Bogor sebesar 1.112.081 jiwa sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.043.070 jiwa yang artinya untuk pemerintah Kota Bogor mengalami penurunan penduduk sebesar 69.011 jiwa atau persentase penurunan sebesar -6,62%.

Berikut peningkatan jumlah penduduk dalam grafik:



Gambar 4.4  
Grafik Peningkatan jumlah penduduk  
Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor  
Periode 2011-2020

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat jelas kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya kecuali tahun 2020 mengalami penurunan pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Penurunan jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 2020 di Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor merupakan dampak dari pandemik covid-19. Akibatnya yakni banyak penduduk yang meninggal dunia, selain itu juga terjadi

perpindahan penduduk yang keluar dari wilayah daerah tersebut. Salah satu faktor perpindahan penduduk itu, seperti warga pendatang yang pulang ke kampung halaman karena pembatasan aktivitas di wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

#### 4.2.2 Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Peranan pendapatan asli daerah sangat penting dalam pembiayaan suatu daerah, karena kemandirian suatu daerah dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Demi mewujudkan kemandirian daerah yang maksimal tentunya diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Pemerintah daerah harus lebih peduli terkait pendapatan asli daerah yang dihasilkannya, hal ini dapat mendorong kemandirian daerah serta mewujudkan program desentralisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat ikut mengambil peran dalam mendukung program pemerintah yang akan dijalankan.

Berikut data yang diperoleh terkait dengan pendapatan asli daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor periode 2011-2020 serta tingkat kenaikan dan penurunannya sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor  
Periode 2011-2020  
(dalam jutaan rupiah)

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah |                  |                                       |                    | Total PAD<br>(Rp) | Persentase<br>(Naik/Turun<br>)<br>(%) |
|-------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
|       | Pajak Daerah           | Retribusi Daerah | Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Lain-lain yang Sah |                   |                                       |
|       | (Rp)                   | (Rp)             | (Rp)                                  | (Rp)               |                   |                                       |
| 2011  | 456.752                | 108.756          | 11.544                                | 108.069            | 685.121           | 19,85                                 |
| 2012  | 741.235                | 127.813          | 32.133                                | 167.368            | 1.068.548         | 26,89                                 |
| 2013  | 882.963                | 145.819          | 13.245                                | 219.008            | 1.261.035         | 27,58                                 |
| 2014  | 1.131.444              | 199.527          | 15.109                                | 366.857            | 1.712.937         | 31,85                                 |
| 2015  | 1.111.623              | 134.141          | 33.580                                | 376.948            | 1.656.291         | 31,67                                 |
| 2016  | 1.520.927              | 136.756          | 43.076                                | 599.104            | 2.299.863         | 38,45                                 |
| 2017  | 1.786.133              | 150.542          | 44.339                                | 1.060.860          | 3.041.872         | 43,61                                 |
| 2018  | 1.969.428              | 112.776          | 44.287                                | 668.233            | 2.794.724         | 38,29                                 |
| 2019  | 2.243.430              | 141.468          | 57.538                                | 718.730            | 3.161.166         | 38,84                                 |
| 2020  | 1.435.707              | 142.352          | 60.962                                | 653.858            | 2.292.880         | 33,77                                 |

(Sumber: jabar.bps.go.id, data diolah oleh penulis tahun 2022)

Persentase kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah (PAD) didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= (\text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain yang sah}) / \text{Pendapatan Daerah} \times 100$$

Berdasarkan tabel 4.2, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pencapaian realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bogor secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang baik dengan kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Walaupun terjadi penurunan perolehan pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.656.291 (dalam jutaan rupiah) yang disebabkan oleh penerimaan pajak dan retribusi yang turun sangat besar dari tahun sebelumnya (Ningsih, 2016), tahun 2018 sebesar Rp. 2.794.724 (dalam jutaan rupiah) hal ini disebabkan karena terjadinya inflasi dan tahun 2020 sebesar Rp. 2.292.880 (dalam jutaan rupiah) yang disebabkan oleh pandemik covid-19 sedangkan perolehan pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.161.166 (dalam jutaan rupiah).

Analisis diatas merupakan analisis tingkat pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Bogor, Selanjutnya untuk dibuatkan perbandingan maka pertama-tama dilakukan analisis tingkat pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020 serta persentase kenaikannya setiap tahun sebagai berikut:

#### 4.2.3 Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor

Tabel 4.3  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bogor  
Periode 2011-2020  
(dalam jutaan rupiah)

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah |                  |                                       |                    | Total PAD<br>(Rp) | Persentase<br>(%) |
|-------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|       | Pajak Daerah           | Retribusi Daerah | Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Lain-lain yang Sah |                   |                   |
|       | (Rp)                   | (Rp)             | (Rp)                                  | (Rp)               |                   |                   |
| 2011  | 165.397                | 35.951           | 13.784                                | 15.318             | 230.450           | 20,67             |
| 2012  | 182.062                | 40.762           | 15.181                                | 14.276             | 252.281           | 18,91             |
| 2013  | 341.420                | 72.309           | 19.569                                | 30.071             | 463.368           | 29,43             |
| 2014  | 376.488                | 77.168           | 23.682                                | 67.499             | 544.836           | 31,00             |
| 2015  | 395.429                | 57.150           | 25.256                                | 139.227            | 617.062           | 33,77             |
| 2016  | 492.139                | 62.728           | 33.107                                | 195.900            | 783.874           | 36,42             |
| 2017  | 555.475                | 49.043           | 29.949                                | 343.336            | 977.804           | 42,72             |
| 2018  | 592.979                | 48.418           | 26.772                                | 244.029            | 912.198           | 39,17             |

|      |         |        |        |         |           |       |
|------|---------|--------|--------|---------|-----------|-------|
| 2019 | 689.543 | 51.362 | 28.242 | 246.737 | 1.015.884 | 39,69 |
| 2020 | 509.039 | 35.010 | 31.927 | 296.040 | 872.017   | 35,91 |

(Sumber: jabar.bps.go.id, data diolah oleh penulis tahun 2022)

Berdasarkan tabel 4.3, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pencapaian realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bogor secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang baik dengan kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Sama seperti halnya dengan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, pada Pemerintah Kota Bogor juga terjadi penurunan perolehan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 912.198 (dalam jutaan rupiah) yang disebabkan oleh inflasi dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 872.017 yang disebabkan oleh pandemik covid 19. Sedangkan pada 2019 perolehan pendapatan asli daerah paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.015.884 (dalam jutaan rupiah).

Dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya akan memberikan dampak positif juga terhadap daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

Dari analisis tingkat pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020 dapat dibuatkan grafik sebagai berikut:



(Sumber: jabar.bps.go.id, data diolah tahun 2022)

Gambar 4.5

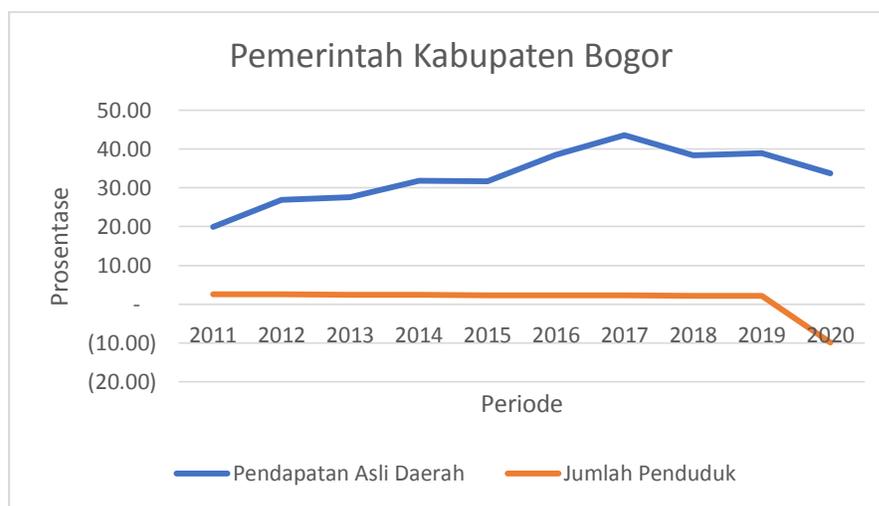
Grafik Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020

Berdasarkan gambar 4.5 terlihat bahwa pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Pada Pemerintah Kabupaten Bogor terjadi penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2015, tahun 2018 dan tahun 2020.

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bogor terjadi penurunan pada tahun 2018 dan 2020 saja. Selain tahun tersebut baik pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor mengalami kenaikan pendapatan asli daerah.

#### 4.2.4 Uraian Analisis pengaruh peningkatan Jumlah penduduk terhadap tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berikut merupakan grafik untuk Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan perbandingan persentase kenaikan dari tahun yang sama antara kenaikan jumlah penduduk dan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:



Gambar 4.6  
Grafik Persentase dari PAD dan Peningkatan Jumlah Penduduk  
pada Pemerintah Kabupaten Bogor  
Periode 2011-2020

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa grafik persentase jumlah penduduk yang berwarna jingga dan persentase pendapatan asli daerah yang berwarna biru pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Grafik persentase jumlah penduduk yang berwarna jingga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali Pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase menjadi sebesar -9,92%. Meskipun terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk tetapi pada tahun 2015 sebesar 31,67%, pada tahun 2018 sebesar 38,29% dan tahun 2020 sebesar 33,77% tingkat pendapatan asli daerah sebaliknya mengalami penurunan.

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bogor juga dilakukan analisis sebagai perbandingan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut:



**Gambar 4.7**  
**Grafik Persentase dari PAD dan Peningkatan Jumlah Penduduk**  
**pada Pemerintah Kota Bogor**  
**Periode 2011-2020**

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan bahwa grafik persentase jumlah penduduk yang berwarna jingga dan persentase pendapatan asli daerah yang berwarna biru pada Pemerintah Kota Bogor. Grafik prosentase jumlah penduduk yang berwarna jingga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -6,62%. Meskipun terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk tetapi pada tahun 2018 sebesar 39,17% dan pada tahun 2020 sebesar 35,91% tingkat pendapatan asli daerah sebaliknya mengalami penurunan.

Dari analisis yang sudah dilakukan terhadap masing-masing variabel yakni peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan asli daerah. Maka dapat dinyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah baik pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan tingkat pendapatan asli daerah pada 8 periode (Periode 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2019) untuk Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 7 periode (Periode 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019).

Pada Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk tahun 2015 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang termasuk wajib pajak yang belum menyetorkan pajaknya. Sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah yang menurun (Ningsih, 2016).

Pada 2018 Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor mengalami penurunan PAD, hal ini disebabkan karena pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen. Dari 82 kota IHK (Indeks Harga Konsumen), 80 kota mengalami inflasi termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor

(BPS,2018). Dilansir dari Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, walaupun berdasarkan data BPS jumlah penduduk mengalami kenaikan dan disisi lain terjadi inflasi yang mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa, hal ini menyebabkan tingkat permintaan terhadap barang dan jasa tersebut oleh penduduk mengalami penurunan dan perekonomian menjadi tidak stabil sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah juga.

Sementara itu pada tahun 2020, berdasarkan data BPS ketika tingkat jumlah penduduk menurun, hal serupa terjadi pada tingkat pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan juga. Hal ini disebabkan oleh pandemik covid-19.

Dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwasanya, peningkatan jumlah penduduk dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.

Dari analisis diatas juga dapat diketahui bahwa pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar pengaruhnya Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Pemerintah Kota Bogor. Hal ini terlihat dari persentase peningkatan jumlah penduduk sebesar 2% setiap tahunnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor sedangkan pada Pemerintah Kota Bogor hanya sekitar 1%. Sehingga memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah ketika jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan maka penerimaan PAD juga meningkat. Berikut disajikan pengujian berdasarkan statistik yang dilakukan, sebagai berikut:

### **4.3 Analisis Data**

#### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.3.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan tabel Test of Normality dengan melihat kolom Kolmogorov Smirnov, apabila nilai  $Sig > 0,05$  maka data berdistribusi normal. Selain itu hasil uji normalitas dapat dibuktikan dengan analisis grafik antara lain menggunakan histogram dan *probability plot* dengan melihat penyebaran titik-titik terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016:154).

Tabel 4.4  
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test  
Pemerintah Kabupaten Bogor

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized<br>Residual |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| N                                |                | 10                         |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                   |
|                                  | Std. Deviation | 4.11921194                 |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .187                       |
|                                  | Positive       | .161                       |
|                                  | Negative       | -.187                      |
| Test Statistic                   |                | .187                       |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .200 <sup>c,d</sup>        |

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Dari tabel di 4.4, Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test pada Pemerintah Kabupaten Bogor dapat diketahui tingkat signifikansi yakni sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

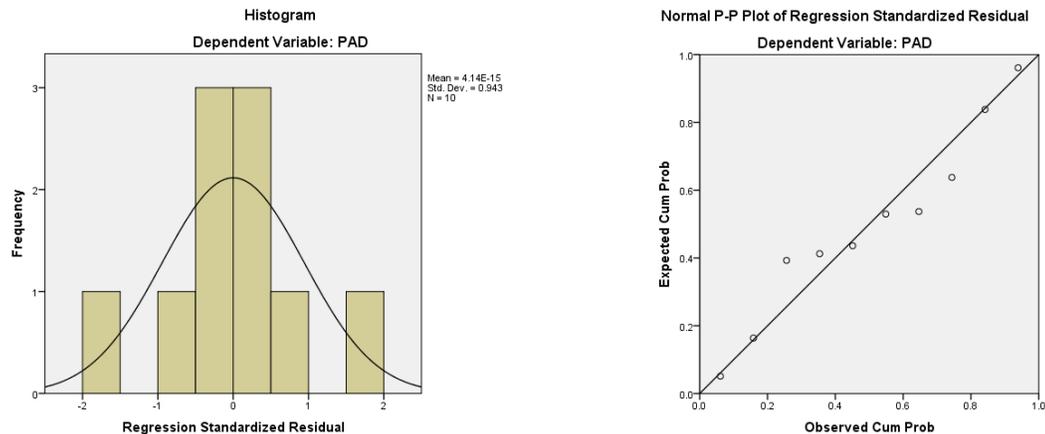
Tabel 4.5  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test  
Pemerintah Kota Bogor**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized<br>Residual |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| N                                |                | 10                         |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                   |
|                                  | Std. Deviation | 4.09920722                 |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .184                       |
|                                  | Positive       | .170                       |
|                                  | Negative       | -.184                      |
| Test Statistic                   |                | .184                       |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .200 <sup>c,d</sup>        |

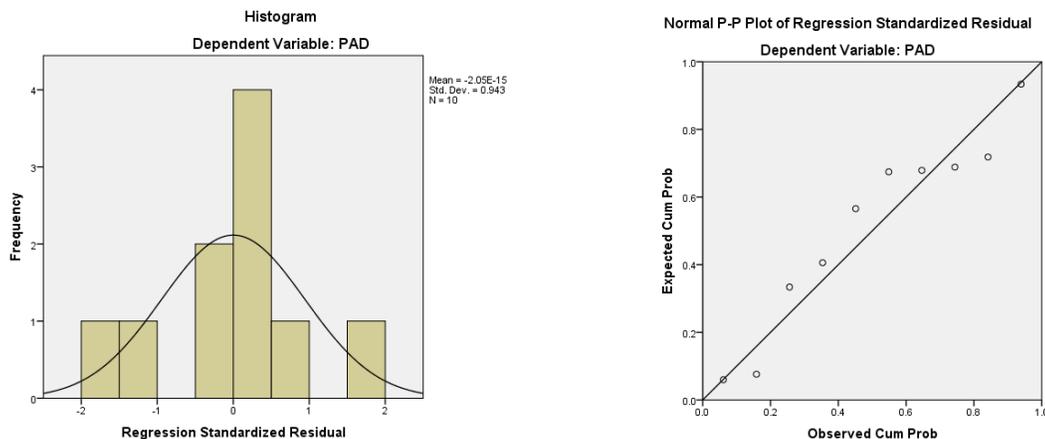
- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Sedangkan dari table 4.5 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test Pemerintah Kota Bogor, dapat diketahui tingkat signifikansi pada pemerintah Kabupaten Bogor maupun kota bogor adalah 0,200, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Semua variabel independen beserta variabel dependen memiliki nilai  $Sig > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas data yang telah diambil untuk diteliti oleh peneliti adalah normal, dapat dibuktikan dengan gambar berikut ini:



Gambar 4.8  
Hasil Uji Normalitas Histogram- PAD dan *Normal Probability Plot* PAD  
Pemerintah Kabupaten Bogor

Pada histogram baik pada Pemerintah Kabupaten Bogor terlihat bahwa, data distribusi nilai residu (error) menunjukkan distribusi normal. Pada normal probability plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal (normal) serta penyebarannya mengikuti garis diagonal (normal). Kedua hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah atau model regresinya memenuhi asumsi normalitas atau residu dari model yang dianggap berdistribusi normal.



Gambar 4.9  
 Hasil Uji Normalitas Histogram- PAD dan *Normal Probability Plot* PAD  
 Pemerintah Kota Bogor

Sedangkan histogram pada Pemerintah Kota Bogor sama seperti halnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa, data distribusi nilai residu (error) menunjukkan distribusi normal. Pada normal probability plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal (normal) serta penyebarannya mengikuti garis diagonal (normal).

#### 4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variante inflation factor* (VIF), jika nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan nilai VIF  $\leq 10$  menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada antar variabel independent.

Tabel 4.6  
 Hasil Uji Multikolinearitas  
 Pemerintah Kabupaten Bogor

|       |            | Coefficients <sup>a</sup>   |        |                           |        | Collinearity Statistics |           |       |
|-------|------------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------|
|       |            | Unstandardized Coefficients |        | Standardized Coefficients | t      | Sig.                    | Tolerance | VIF   |
| Model | B          | Std. Error                  | Beta   |                           |        |                         |           |       |
| 1     | (Constant) | 101.559                     | 17.477 |                           | 5.811  | .000                    |           |       |
|       | JP         | -29.441                     | 7.490  | -.812                     | -3.931 | .004                    | 1.000     | 1.000 |

a. Dependent Variable: PAD

Dari hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan pada Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 1000 untuk nilai Tolerance dan VIF dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 4.7  
 Hasil Uji Multikolinearitas  
 Pemerintah Kota Bogor

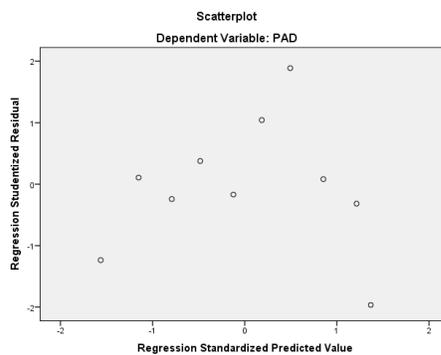
| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized | t     | Sig.   | Collinearity Statistics |       |
|-------|-----------------------------|------------|--------------|-------|--------|-------------------------|-------|
|       | B                           | Std. Error | Beta         |       |        | Tolerance               | VIF   |
|       | 1                           | (Constant) | 85.874       |       |        |                         |       |
|       | JP                          | -32.480    | 6.944        | -.856 | -4.677 | .002                    | 1.000 |

a. Dependent Variable: PAD

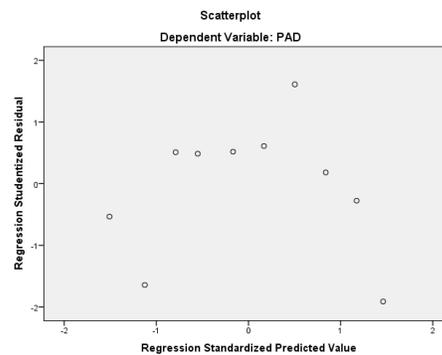
Sedangkan hasil uji multikolinearitas pada Pemerintah Kota Bogor juga sebesar 1000 untuk nilai Tolerance dan VIF dengan demikian pula, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk Kedua daerah tersebut yang artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen).

#### 4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi linier apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadinya Homoskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk melihat ada heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik Scatterplot dan juga Uji Glejser. Pada Grafik Scatterplot, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 4.9  
Hasil Uji Heterokedastisitas  
Kabupaten Bogor



Gambar 4.10  
Hasil Uji Heterokedastisitas  
Kota Bogor

Hasil analisis pada gambar 4.9 dan 4.10 untuk Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak

membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedasitas.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Glesjser pada Kabupaten Bogor

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant) | 12.606                      | 11.418     |                           | 1.104 | .302 |
|                           | JP         | -4.192                      | 4.893      | -.290                     | -.857 | .417 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Berdasarkan data hasil Uji Glejser di atas, dapat dilihat untuk Pemerintah Kabupaten Bogor nilai signifikansinya (p-value) variabel jumlah penduduk sebesar 0,417. Dari hasil yang diperoleh tersebut dapat diartikan bahwa dalam analisis regresi tersebut tidak terdapat gejala heteroskedasitas karena nilai probabilitas signifikansinya diatas 0,05 atau 5%.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Glesjser pada Kota Bogor

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant) | 5.397                       | 6.539      |                           | .825  | .433 |
|                           | JP         | -1.357                      | 3.970      | -.120                     | -.342 | .741 |

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Sedangkan, data hasil Uji Glesjser untuk Pemerintah Kota Bogor nilai signifikansinya (p-value) variabel Jumlah sebesar 0,741. Sama seperti halnya Kabupaten Bogor, bahwa dapat diartikan dalam analisis regresi tersebut tidak terdapat gejala heteroskedasitas karena nilai probabilitas signifikansinya diatas 0,05 atau 5%.

#### 4.3.1.4 Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian ini menggunakan uji durbin-watson (Ghozali, 2016:107) dengan sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Hasil Uji AutoKorelasi Durbin-Watson  
Pemerintah Kabupaten Bogor

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .812 <sup>a</sup> | .659     | .616              | 4.36908                    | 1.074         |

a. Predictors: (Constant), JP

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil pengujian AutoKorelasi Durbin-Watson yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bogor diperoleh angka Durbin-Watson sebesar 1,074.

Tabel 4.11  
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson  
Pemerintah Kota Bogor

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .856 <sup>a</sup> | .732     | .699              | 4.34787                    | 1.145         |

a. Predictors: (Constant), JP

b. Dependent Variable: PAD

Sedangkan berdasarkan hasil pengujian AutoKorelasi Durbin-Watson yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor diperoleh angka Durbin-Watson sebesar 1,145.

Adapun rekapan nilai d, dL dan dU untuk penarikan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.12  
Rekapan nilai d, dL dan dU

| Pemerintah Kabupaten Bogor |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| d                          | dL     | dU     | 4-dL   | 4-dU   |
| 1,074                      | 0,8791 | 1,3197 | 3,1209 | 2,6821 |
| Pemerintah Kota Bogor      |        |        |        |        |
| d                          | dL     | dU     | 4-dL   | 4-dU   |
| 1,145                      | 0,8791 | 1,3197 | 3,1209 | 2,6821 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pada Kabupaten Bogor yakni  $dL < d < dU$  atau  $0,8791 < 1,074 < 1,3197$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak dapat disimpulkan pada uji autokorelasi pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan, pada Kota Bogor memiliki nilai yakni  $dL < d < dU$  atau  $2,3857 < 2,3920 < 3,3028$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak dapat disimpulkan pada uji autokorelasi pada Pemerintah Kota Bogor.

### 4.3.2 Uji Hipotesis

#### 4.3.2.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu yaitu  $0 < R^2 < 1$  (Ghozali, 2016:95).

Tabel 4.13  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Pemerintah Kabupaten Bogor

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .812 <sup>a</sup> | .659     | .616              | 4.36908                    | 1.074         |

a. Predictors: (Constant), JP

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil pengujian uji koefisien determinasi pada Kabupaten Bogor dalam tabel 4.13 menjelaskan bahwa besarnya nilai *R Square* adalah 0,659. Hal ini berarti bahwa 65,9% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel peningkatan jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar 34,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 4. 14  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Pemerintah Kota Bogor

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .856 <sup>a</sup> | .732     | .699              | 4.34787                    | 1.145         |

a. Predictors: (Constant), JP

b. Dependent Variable: PAD

Tidak jauh berbeda dengan hasil pengujian uji koefisien determinasi pada Pemerintah Kota Bogor dalam tabel 4.14 menjelaskan bahwa besarnya nilai *R Square* adalah 0,732. Hal ini berarti bahwa 73,2% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel peningkatan jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar 26,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### 4.3.2.2 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t yaitu apabila nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$  dan nilai t hitung  $< t$  tabel, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$  dan nilai t hitung  $> t$  tabel, maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15  
Hasil Uji Parsial (Uji t)  
Pemerintah Kabupaten Bogor

|       |            | Coefficients <sup>a</sup>   |        |                           |        |      | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |            | Unstandardized Coefficients |        | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Tolerance               | VIF   |
| Model | B          | Std. Error                  | Beta   |                           |        |      |                         |       |
| 1     | (Constant) | 101.559                     | 17.477 |                           | 5.811  | .000 |                         |       |
|       | JP         | -29.441                     | 7.490  | -.812                     | -3.931 | .004 | 1.000                   | 1.000 |

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel 4.15 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung peningkatan jumlah penduduk (X) sebesar 0,007 dengan signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:9) adalah 2,262 maka t hitung  $< t$  tabel ( $-3,931 < 2,262$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4.16  
Hasil Uji Parsial (Uji t)  
Pemerintah Kota Bogor

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta         |        |      | Tolerance               | VIF   |
|       |            |                             |            |              |        |      |                         |       |
| 1     | (Constant) | 85.874                      | 11.436     |              | 7.509  | .000 |                         |       |
|       | JP         | -32.480                     | 6.944      | -.856        | -4.677 | .002 | 1.000                   | 1.000 |

a. Dependent Variable: PAD

Berbeda dengan Kota Bogor, dari tabel 4.16 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung peningkatan jumlah penduduk (X) sebesar -4,677 dengan signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Dengan perbandingan t hitung dan t tabel ( $0,025:9$ ) adalah 2,262 maka t hitung  $<$  t tabel ( $-4,677 < 2,262$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### 4.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independent berhubungan dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan hasil uji regresi linier sederhana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda  
Pemerintah Kabupaten Bogor

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized | t      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta         |        |      |
|       |            |                             |            |              |        |      |
| 1     | (Constant) | 101.559                     | 17.477     |              | 5.811  | .000 |
|       | JP         | -29.441                     | 7.490      | -.812        | -3.931 | .004 |

a. Dependent Variable: PAD

$$Y = a + b_1X_1 + \mu$$

$$Y = 101,559 + (- 26,234 X_1) + \mu$$

Keterangan

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Peningkatan Jumlah Penduduk

$\mu$  = *Disturbance error*

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 101,559 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka pendapatan asli daerah bernilai 101,559.
- Peningkatan jumlah penduduk sebesar -29,441 artinya apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar -29,441 satuan.

Tabel 4.18  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda  
Pemerintah Kota Bogor

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant) | 85.874                      | 11.436     |                           | 7.509  | .000 |
|                           | JP         | -32.480                     | 6.944      | -.856                     | -4.677 | .002 |

a. Dependent Variable: PAD

$$Y = a + b_1X_1 + \mu$$

$$Y = 85,874 + (- 32,840 X_1) + \mu$$

Keterangan

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Peningkatan Jumlah Penduduk

μ = *Disturbance error*

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 85,874 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka pendapatan asli daerah bernilai 85,974.
- Peningkatan jumlah penduduk sebesar -32,480 artinya apabila penduduk naik sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar -32,480 satuan.

#### 4.4 Pembahasan

Hasil didasarkan pada penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 22.0 dengan uji t (parsial). Hasil dari hipotesis penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.19  
Hasil Pengujian Hipotesis

| Kode           | Hipotesis   | Hasil Uji Hipotesis |
|----------------|---|---------------------|
| H <sub>1</sub> | Peningkatan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor | Diterima            |
| H <sub>2</sub> | Peningkatan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bogor                                | Diterima            |

Tabel 4.19 di atas menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak.

1. Hipotesis: Diterima

- Pemerintah Kabupaten Bogor

Dari tabel 4.15 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung peningkatan jumlah penduduk ( $X_1$ ) sebesar -3,931 dengan signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:9) adalah 2,262 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-3,931 < 2,262$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Hipotesis: Diterima

- Pemerintah Kota Bogor

Berbeda dengan Kota Bogor, dari tabel 4.16 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung produk domestik regional bruto ( $X_1$ ) sebesar 4,677 dengan signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Dengan perbandingan t hitung dan t tabel (0,025:9) adalah 2,262 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-4,677 < 2,262$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### 4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor pada periode 2011-2020 yang menggunakan alat bantu SPSS Versi 22.0 tentang pengaruh Peningkatan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

#### **4.5.1 Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor**

Jumlah penduduk merupakan jumlah total keseluruhan penduduk yang menetap atau berdomisili di suatu wilayah tertentu. Penduduk merupakan penggerak perekonomian yang akan memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan suatu wilayah.

Data yang terpublikasikan dalam laporan BPS Jawa Barat bahwa jumlah penduduk meningkat pada setiap tahunnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Peningkatan jumlah penduduk dapat dikatakan suatu peluang yang potensial karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, yaitu di sisi permintaan dan di sisi penawaran. Dari sisi permintaan, dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi konsumen dalam jumlah yang besar pula. Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah penduduk akan menjadi produsen sebagai penghasil barang dan jasa.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menyebabkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut semakin baik, ketika usaha semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Pemerintah Kabupaten Bogor, dari hasil pengujian statistik, dari tabel 4.15 Dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung peningkatan jumlah penduduk ( $X$ ) sebesar  $-3,931$  dengan signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t$  hitung dengan  $t$  tabel ( $0,025:9$ ) adalah  $2,262$  maka  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $-3,931 < 2,262$ ).

#### **4.5.2 Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor**

Berbeda dengan Kota Bogor, dari tabel 4.16 Dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung peningkatan jumlah penduduk ( $X$ ) sebesar  $-4,677$  dengan signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Dengan perbandingan  $t$  hitung dan  $t$  tabel ( $0,025:9$ ) adalah  $2,262$  maka  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $-4,677 < 2,262$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil pengujian statistik, menunjukkan bahwa pada pengujian untuk Pemerintah Kabupaten Bogor lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan pemerintah Kota Bogor. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik untuk Pemerintah Kota Bogor dengan signifikansi  $0,002$  lebih kecil dibandingkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan signifikansi  $0,007$ . Hal ini sesuai dengan analisis variabel penelitian berdasarkan realisasi dan persentase sebelum pengujian statistik.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdar dan Naidah (2020), Gufron Reynaldin (2017), Matius Liaran (2021) dan Demitianus Murib, Rosalina, dkk (2018) menyatakan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten bogor dan pemerintah kota bogor periode 2011-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

- Peningkatan Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 kedua pemerintah daerah tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk disebabkan pandemik covid-19. Jika dilihat berdasarkan angka realisasinya, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan Pemerintah Kota Bogor.

- Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

Pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor secara keseluruhan lebih banyak mengalami peningkatan dibandingkan penurunannya. Pada Pemerintah Kabupaten Bogor penurunan terjadi pada periode 2015 penerimaan pajak dan retribusi yang turun sangat besar dari tahun sebelumnya, periode 2018 disebabkan karena inflasi dan 2020 disebabkan karena pandemic covid-19 sedangkan Pemerintah Kota Bogor hanya tahun 2018 dan 2020. Dilihat dari realisasi PAD memang Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki PAD lebih besar dibandingkan Pemerintah Kota Bogor.

- Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Kota Bogor periode 2011-2020.

Dari hasil pengujian statistik, dari tabel 4.15 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung peningkatan jumlah penduduk (X) sebesar -3.931 dengan signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:9) adalah 2,262 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-3,931 < 2,262$ ). Sedangkan pada Pemerintah Kota Bogor, dari tabel 4.16 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung peningkatan jumlah penduduk (X) sebesar -4,677 dengan signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Dengan perbandingan t hitung dan t tabel (0,025:9) adalah 2,262 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-4,677 < 2,262$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### 4.7 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah:

- Pada Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor juga dapat mengintensifkan peningkatan pengawasan wajib pajak bagi para penduduk yang berada pada umur produktif dan sudah bekerja, diikuti dengan bertambahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada penduduk akan mampu menciptakan situasi yang kondusif. Dengan hal ini sangat diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin untuk pembangunan suatu daerah atau alokasi belanja yang bermanfaat. Sangat diharapkan supaya pemerintah lebih jeli untuk melihat pembangunan perekonomian yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya:

- Bagi para peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar menambah variabel penelitian tetapi dengan variabel yang berbeda atau variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat dilihat bahwa selain Jumlah penduduk terdapat juga variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya Inflasi, PDRB dan Pendapatan Perkapita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, O. V., Handra, H., & Adrimas, A. (2019). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Benefita*, 4(3), 536.
- Agustin, Anisa. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor.
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69.
- Asdar, A., & Naidah, N. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(2), 185–209.
- Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pengertian Jumlah Penduduk dan PDRB*. Indonesia. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada 30 September 2021].
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten dan Kota*. Jawa Barat. Tersedia di: <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html> [Diakses pada 5 Oktober 2021].
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018). Desember 2018 inflasi sebesar 0,62 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 2,09 persen Tersedia di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/02/1540/desember-2018-inflasi-sebesar-0-62-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kupang-sebesar-2-09-persen-.html> [Diakses pada 5 Juli 2022].
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Bidarti, Agustina. (2020). *Teori Kependudukan*. Palembang: Penerbit Lindan Bestari.
- Conway, Edmund. (2015). *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui*. Jakarta: Esensi Erlangga.
- Effendie, (2017). *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Ekonomi Provinsi Jawa Barat. *Penguatan Ekonomi di Kota Bogor*. Tersedia di: <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/39222/2020/09/16/Ini-Sejumlah-Rekomendasi-BI-Jabar-untuk-Penguatan-Ekonomi-di-Kota-Bogor> [Diakses pada 10 mei 2022].
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 edisi VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakib, A., & Arifin, A. (2020). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASATA. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 290-300.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi: 4*. Salemba Empat: Jakarta.
- Irma, M. I (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh total penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Universitas Malikussaleh*, 01(02), 58–64.
- Kintan. (2019). *Bapenda Kota Bogor Kejar Target Perbandingan PAD dan APBD 47 Persen*. Tersedia di: [https://jabarprov.go.id/index.php/news/32321/Bapenda\\_Kota\\_Bogor\\_Kejar\\_Target\\_Perbandingan\\_PAD\\_dan\\_APBD\\_47\\_Persen#](https://jabarprov.go.id/index.php/news/32321/Bapenda_Kota_Bogor_Kejar_Target_Perbandingan_PAD_dan_APBD_47_Persen#) [Diakses 12 Desember 2021].
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan Masalah, Kebijakan, dan Politik* Jakarta: Erlangga.
- Kusnandar, Viva Budi. (2018). *Kabupaten Bogor memiliki Pendapatan Asli Daerah Terbesar di Jawa Barat pada 2018*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/kabupaten-bogor-memiliki-pendapatan-asli-daerah-terbesar-di-jawa-barat-pada-2018>, [diakses pada 7 Desember 2021].
- Liaran, M. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mappi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(4), 443-449.
- Mangkoesebroto, Guritno. (2018). *Ekonomi Publik edisi ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi: Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi: Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

- Mulyadi S. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murib, D. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Muslim, C., & Rahman, Z. (2019). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 57-65.
- Ningsih, Ayu. (2016). Pendapatan Pajak Kabupaten Bogor Turun Hingga Rp 162,6 Miliar. Tersedia di <https://bogor.pojoksatu.id/baca/haduh-haduh-pendapatan-pajak-kabupaten-bogor-turun-hingga-rp1626-miliar> [Diakses 15 Juli 2022].
- Nur, I. I., Amaliah, I., dan Haviz, M. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(2). 386–393.
- Nurmiati, N., Diana, F., & Murbayani, M. (2019). Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *In Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur*, Vol. 1, No. 1, pp. 89-100.
- Putri, F. E., Sudarmanto, E., & Maimunah, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(3).
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Portal Resmi Kabupaten Bogor. (2022). Profil Kabupaten Bogor. Tersedia di <https://bogorkab.go.id/> [Diakses pada 2 Maret 2022].
- Potal Resmi Kota Bogor. (2022). Sekilas Kota Bogor. Tersedia di <https://kotabogor.go.id/> [Diakses pada 2 Maret 2022]
- Pramono, R. Widodo dan Ratna Eka S. (2019). *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*. Jakarta: Deepublish.
- Rahayu, Ria. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2010-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor

- Sari, P. R., & Sugiyanto, E. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota se-Eks Karesidenan Surakarta)*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sistem Informasi Rujukan Statistik. (2021). *Laju Pertumbuhan PDRB*. Tersedia di: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/3> [Diakses pada 28 November 2021].
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafitri, Ardian. (2020). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.
- Syahrain, R. (2019). Peranan Retribusi Pasar dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akrab Juara*, 4(4), 133-143.
- Undang-Undang RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*.
- Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Yunus, Rabina. (2021). *Sistem Keuangan Daerah*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Zein, A. S. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 51.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Arifiyani  
Alamat : Jl. Raya Kemang Sekolahan Rt 03 Rw 06 No.11 Kec.  
Kemang Kab.Bogor  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 25 November 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Kemang 01  
• SMP : SMPN 6 Bogor  
• SMA : SMAN 2 Bogor  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022  
Peneliti,

Novia Arifiyani

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2011-2015 (Dalam Ribuan Rupiah)

| KABUPATEN BOGOR  | Tahun            |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
| <b>Jenis Penerimaan</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pendapatan Daerah  | 3,451,755,115.30 | 3,974,405,353.00 | 4,572,332,367.00 | 5,378,094,139.80 | 5,230,638,127.00 |
| Pendapatan Asli Daerah   | 685,121,399.93   | 1,068,548,454.00 | 1,261,034,564.00 | 1,712,937,376.14 | 1,656,290,853.00 |
| Pajak Daerah   | 436,752,497.70   | 741,235,206.00   | 882,963,474.00   | 1,131,443,649.70 | 1,111,622,860.00 |
| Retribusi Daerah   | 108,755,927.35   | 127,812,577.00   | 145,818,508.00   | 199,527,357.90   | 134,140,654.00   |
| Hasil Perusahaan Miliki Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11,544,304.95    | 32,132,646.00    | 13,244,857.00    | 15,109,074.96    | 33,579,530.00    |
| Lain-lain PAD yang Sah   | 108,068,669.92   | 167,368,025.00   | 219,007,725.00   | 366,857,293.58   | 376,947,809.00   |
| Dana Perimbangan   | 1,781,177,918.86 | 2,048,587,761.00 | 2,310,876,712.00 | 2,498,370,936.94 | 2,471,188,907.00 |
| Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                                | 295,335,404.86   | 217,945,849.00   | 206,411,880.00   | 252,458,405.04   | 213,784,795.00   |
| Dana Alokasi Umum  | 1,326,116,914.00 | 1,672,614,142.00 | 1,887,770,112.00 | 2,055,944,991.90 | 2,163,439,062.00 |
| Dana Alokasi Khusus  | 159,725,600.00   | 158,027,770.00   | 216,694,720.00   | 189,997,540.00   | 93,965,050.00    |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah  | 955,455,796.52   | 857,027,770.00   | 1,000,421,091.00 | 1,166,785,826.72 | 1,103,158,367.00 |
| Pembiayaan Daerah  | 273,200,943.81   | 478,704,329.00   | 751,793,492.00   | 673,082,956.71   | 1,058,107,503.00 |
| <b>Jenis Pengeluaran</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Belanja Tidak Langsung   | 1,660,958,254.96 | 1,779,883,679.00 | 2,071,735,671.00 | 2,236,881,395.67 | 2,786,014,321.00 |
| Belanja Pegawai  | 1,243,574,049.17 | 1,430,702,693.00 | 1,543,493,988.00 | 1,792,660,858.98 | 2,085,328,036.00 |
| Belanja Bunga  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Subsidi  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Hibah  | 135,782,621.87   | 105,440,100.00   | 178,267,913.00   | 90,667,749.39    | 75,337,700.00    |
| Belanja Bantuan Sosial   | 108,144,255.03   | 13,365,500.00    | 10,015,000.00    | 11,942,385.00    | 33,158,500.00    |
| Belanja Bagi Hasil   | 30,651,415.41    | 51,927,138.00    | 82,285,116.00    | 95,088,516.72    | 97,632,832.00    |
| Belanja Bantuan Keuangan   | 141,754,393.16   | 168,485,814.00   | 254,294,736.00   | 234,081,035.00   | 474,557,253.00   |
| Pengeluaran Tak Terduga  | 1,051,520.32     | 9,962,434.00     | 3,378,918.00     | 12,440,850.58    | 20,000,000.00    |
| Belanja Langsung   | 1,576,798,443.73 | 1,894,117,657.00 | 2,542,535,059.00 | 2,663,001,879.43 | 3,476,687,309.00 |
| Belanja Pegawai  | 187,974,180.48   | 196,517,642.00   | 265,558,827.00   | 340,586,340.00   | 391,658,760.00   |
| Belanja Barang dan Jasa  | 685,153,533.25   | 662,132,581.00   | 960,194,526.00   | 1,090,165,857.16 | 1,286,787,530.00 |
| Belanja Modal  | 703,670,729.99   | 1,035,467,434.00 | 1,316,781,706.00 | 1,232,249,682.27 | 1,789,241,019.00 |
| Pembiayaan Daerah  | 487,199,360.42   | 779,108,346.00   | 709,855,129.00   | 1,151,293,821.41 | 26,044,000.00    |

Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

**Lampiran 2**  
**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

| KABUPATEN BOGOR  | Tahun            |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jenis Penerimaan   | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| Pendapatan Daerah  | 5,980,967,669.74 | 6,975,053,078.04 | 7,298,466,120.54 | 8,137,989,873.80 | 6,789,030,535.00 |
| Pendapatan Asli Daerah   | 2,299,862,658.79 | 3,041,872,447.91 | 2,794,723,739.66 | 3,161,165,915.50 | 2,292,879,501.00 |
| Pajak Daerah   | 1,520,926,674.88 | 1,786,132,725.18 | 1,969,427,530.84 | 2,243,429,745.16 | 1,435,706,728.00 |
| Retribusi Daerah   | 136,756,226.16   | 150,541,572.10   | 112,776,035.99   | 141,468,140.18   | 142,352,279.00   |
| Hasil Perusahaan Miliki Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 43,075,638.05    | 44,338,643.61    | 44,287,173.00    | 57,537,749.30    | 60,962,146.00    |
| Lain-lain PAD yang Sah   | 599,104,119.71   | 1,060,859,507.03 | 668,232,999.83   | 718,730,280.85   | 653,858,348.00   |
| Dana Perimbangan   | 2,692,157,023.14 | 2,742,839,370.82 | 2,816,814,498.27 | 3,094,445,817.30 | 2,871,560,707.00 |
| Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                                | 267,917,072.22   | 269,361,187.85   | 262,173,257.27   | 315,087,463.20   | 344,425,736.00   |
| Dana Alokasi Umum  | 1,917,780,234.00 | 1,902,004,175.00 | 1,919,023,527.00 | 2,034,853,421.00 | 1,883,257,955.00 |
| Dana Alokasi Khusus  | 506,469,716.92   | 571,474,008.17   | 635,617,714.00   | 744,504,933.10   | 643,977,016.00   |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah  | 988,937,987.81   | 1,190,341,259.31 | 1,686,927,882.61 | 1,882,378,141.01 | 1,624,590,327.00 |
| Pembiayaan Daerah  | 1,349,935,662.27 | 696,587,130.03   | 923,862,212.35   | 846,364,143.13   | 1,034,841,125.00 |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jenis Pengeluaran</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Belanja Tidak Langsung   | 3,083,375,228.50 | 3,672,959,405.42 | 3,672,650,462.85 | 3,541,262,768.83 | 3,893,372,556.00 |
| Belanja Pegawai  | 2,045,082,450.92 | 2,432,862,122.50 | 2,219,154,499.00 | 2,253,964,864.65 | 2,182,612,915.00 |
| Belanja Bunga  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Subsidi  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Hibah  | 108,858,733.00   | 221,563,642.08   | 518,180,272.00   | 240,010,963.54   | 205,444,988.00   |
| Belanja Bantuan Sosial   | 43,245,630.00    | 34,614,400.00    | 22,264,100.00    | 18,933,500.00    | 46,556,200.00    |
| Belanja Bagi Hasil   | 109,557,277.65   | 135,194,512.29   | 158,976,844.85   | 165,801,722.65   | 167,956,129.00   |
| Belanja Bantuan Keuangan   | 763,780,203.28   | 834,111,180.23   | 738,976,413.00   | 852,673,765.91   | 836,199,111.00   |
| Pengeluaran Tak Terduga  | 12,850,933.65    | 14,613,548.33    | 15,098,334.00    | 9,877,952.07     | 454,603,213.00   |
| Belanja Langsung   | 3,381,925,325.37 | 3,202,782,914.56 | 3,632,315,524.00 | 4,229,955,410.95 | 3,930,499,104.00 |
| Belanja Pegawai  | 485,321,060.23   | -                | 371,480,476.00   | 429,357,951.92   | 289,604,637.00   |
| Belanja Barang dan Jasa  | 1,354,830,222.58 | 1,677,630,861.94 | 1,947,006,309.00 | 2,232,903,738.36 | 2,044,251,036.00 |
| Belanja Modal  | 1,541,830,222.58 | 1,525,152,052.62 | 1,313,828,739.00 | 1,567,693,720.67 | 1,596,643,431.00 |
| Pembiayaan Daerah  | 865,602,777.14   | 795,897,888.08   | 917,362,346.04   | 1,213,135,837.16 | -                |

Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

**Lampiran 3**  
**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2015**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

| KOTA BOGOR   | Tahun            |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
| <b>Jenis Penerimaan</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pendapatan Daerah  | 1,141,638,163.97 | 1,334,121,611.00 | 1,574,372,009.00 | 1,757,697,381.84 | 1,827,008,273.93 |
| Pendapatan Asli Daerah   | 230,449,644.62   | 252,280,722.00   | 463,368,420.00   | 544,835,708.25   | 617,062,227.09   |
| Pajak Daerah   | 165,396,746.06   | 182,062,000.00   | 341,419,705.00   | 376,487,551.01   | 395,428,650.00   |
| Retribusi Daerah   | 35,950,801.66    | 40,761,809.00    | 72,309,277.00    | 77,167,650.95    | 57,149,706.06    |
| Hasil Perusahaan Miliki Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,784,056.94    | 15,180,504.00    | 19,568,718.00    | 23,681,532.60    | 25,256,473.55    |
| Lain-lain PAD yang Sah   | 15,318,039.96    | 14,276,409.00    | 30,070,720.00    | 67,498,973.69    | 139,227,395.48   |
| Dana Perimbangan   | 602,216,655.33   | 732,264,238.00   | 792,975,350.00   | 855,645,928.02   | 840,331,669.00   |
| Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                                | 120,803,371.33   | 113,497,638.00   | 86,786,928.00    | 89,831,370.02    | 93,571,811.00    |
| Dana Alokasi Umum  | 472,888,334.00   | 603,531,550.00   | 686,520,759.00   | 732,337,058.00   | 737,833,158.00   |
| Dana Alokasi Khusus  | 8,524,950.00     | 15,235,050.00    | 19,667,663.00    | 33,477,500.00    | 8,926,700.00     |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah  | 308,971,864.02   | 349,576,651.00   | 318,0128,239.00  | 257,215,745.57   | 369,614,377.84   |
| Pembiayaan Daerah  | 97,655,357.44    | 164,445,917.00   | 197,938,800.00   | 302,181,957.85   | 212,475,303.10   |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jenis Pengeluaran</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Belanja Tidak Langsung   | 651,341,702.52   | 617,733,289.00   | 759,629,257.00   | 779,840,621.49   | 932,916,867.53   |
| Belanja Pegawai  | 541,591,289.79   | 577,019,845.00   | 666,001,629.00   | 726,175,854.41   | 818,447,053.27   |
| Belanja Bunga  | -                | 1,454,835.00     | 993,071.00       | 352,475.56       | 6,608,600.00     |
| Belanja Subsidi  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Hibah  | 30,001,151.75    | 19,088,470.00    | 66,125,574.00    | 35,272,296.00    | 45,274,828.00    |
| Belanja Bantuan Sosial   | 77,973,952.45    | 4,277,857.00     | 22,061,276.00    | 14,654,510.98    | 49,274,000.00    |
| Belanja Bagi Hasil   | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Bantuan Keuangan   | -                | 935,732.00       | -                | 852,232.54       | 1,115,203.19     |
| Pengeluaran Tak Terduga  | 1,775,308.53     | 14,956,550.00    | 4,447,707.00     | 2,533,268.00     | 12,197,183.07    |
| Belanja Langsung   | 423,234,812.78   | 737,759,636.00   | 662,503,114.00   | 923,121,854.96   | 1,105,630,661.50 |
| Belanja Pegawai  | 67,535,066.06    | 100,301,607.00   | 88,649,062.00    | 124,035,291.26   | 172,082,072.49   |
| Belanja Barang dan Jasa  | 222,746,788.68   | 307,061,581.00   | 349,545,993.00   | 299,750,681.28   | 432,905,673.29   |
| Belanja Modal  | 132,952,958.04   | 330,396,448.00   | 224,308,059.00   | 499,335,882.43   | 500,642,915.72   |
| Pembiayaan Daerah  | 164,717,006.12   | 143,074,603.00   | 350,178,438.00   | 358,916,863.25   | 936,048.00       |

Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

**Lampiran 4**  
**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Bogor Periode 2016-2020**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

| KOTA BOGOR   | Tahun            |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| <b>Jenis Penerimaan</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pendapatan Daerah  | 2,152,370,082.89 | 2,288,965,527.72 | 2,382,730,432.67 | 2,559,857,208.00 | 2,428,579,504.12 |
| Pendapatan Asli Daerah   | 783,873,587.22   | 977,803,906.99   | 912,197,971.29   | 1,015,884,217.00 | 872,017,242.12   |
| Pajak Daerah   | 492,138,653.39   | 555,475,409.59   | 592,978,746.86   | 689,543,005.50   | 509,039,468.00   |
| Retribusi Daerah   | 62,727,631.46    | 49,043,299.93    | 48,418,070.32    | 51,362,152.50    | 35,010,375.00    |
| Hasil Perusahaan Miliki Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 33,107,211.23    | 29,949,487.13    | 26,772,427.41    | 28,241,845.00    | 31,927,293.00    |
| Lain-lain PAD yang Sah   | 195,900,091.15   | 343,335,710.35   | 244,028,726.71   | 246,737,214.00   | 296,040,104.12   |
| Dana Perimbangan   | 1,097,614,311.44 | 1,072,486,473.77 | 1,066,762,734.20 | 1,106,494,406.00 | 1,083,171,965.00 |
| Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                                | 96,843,148.41    | -                | 94,958,394.94    | 77,654,424.00    | 125,014,722.00   |
| Dana Alokasi Umum  | 806,089,544.00   | -                | 791,929,143.00   | 838,948,449.00   | 762,556,115.00   |
| Dana Alokasi Khusus  | 194,681,619.03   | -                | 179,875,196.27   | 189,891,553.00   | 195,601,128.00   |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah  | 270,882,184.23   | 238,675,146.96   | 349,769,727.18   | 437,478,585.00   | 141,063,595.00   |
| Pembiayaan Daerah  | 340,597,623.60   | 305,753,186.22   | 388,671,502.47   | 401,802,130.00   | 334,337,717.19   |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jenis Pengeluaran</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Belanja Tidak Langsung   | 904,608,992.28   | 1,148,992,045.75 | 1,042,748,114.75 | 1,080,707,778.92 | 1,172,482,165.00 |
| Belanja Pegawai  | 868,927,388.61   | 1,030,115,640.84 | 873,107,978.52   | 946,231,166.79   | 902,722,167.00   |
| Belanja Bunga  | 2,646,198.57     | 5,685,279.33     | 6,598,058.98     | 6,578,046.14     | 5,427,749.00     |
| Belanja Subsidi  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belanja Hibah  | 26,636,028.50    | 75,685,279.33    | 118,993,313.29   | 79,149,334.37    | 93,233,838.00    |
| Belanja Bantuan Sosial   | 29,748.90        | 28,383,948.00    | 38,774,816.90    | 46,743,922.30    | 43,686,703.00    |
| Belanja Bagi Hasil   | -                | 3,371,939.61     | -                | -                | -                |
| Belanja Bantuan Keuangan   | 991,621.22       | 3,371,939.61     | 3,716,867.12     | 1,995,853.32     | 1,134,531.00     |
| Pengeluaran Tak Terduga  | 5,378,006.48     | 2,270,05.96      | 1,557,079.95     | 9,456.00         | 126,277,178.00   |
| Belanja Langsung   | 1,210,687,895.99 | 1,097,580,564.42 | 1,363,838,822.09 | 1,447,793,024.02 | 1,182,388,538.00 |
| Belanja Pegawai  | 175,103,589.80   | -                | 235,582,060.17   | 235,658,195.00   | 107,389,674.00   |
| Belanja Barang dan Jasa  | 483,099,789.16   | 664,718,881.92   | 672,795,038.32   | 711,101,423.00   | 798,841,580.00   |
| Belanja Modal  | 552,484,517.04   | 432,861,752.50   | 455,461,723.59   | 501,033,406.02   | 276,157,283.00   |
| Pembiayaan Daerah  | 377,670,818.22   | 348,216,103.77   | 310,814,998.29   | 433,158,534.85   | 80,545,341.00    |

Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

Lampiran 5  
 Jumlah Penduduk Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor  
 Periode 2011-2020  
 (Dalam Satuan Jiwa)

| Tahun | Jumlah Penduduk                      |                                 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
|       | Pemerintah Kabupaten Bogor<br>(Jiwa) | Pemerintah Kota Bogor<br>(Jiwa) |
| 2011  | 4.943.746                            | 976.791                         |
| 2012  | 5.073.116                            | 995.081                         |
| 2013  | 5.202.097                            | 1.013.019                       |
| 2014  | 5.331.149                            | 1.030.720                       |
| 2015  | 5.459.668                            | 1.047.922                       |
| 2016  | 5.587.390                            | 1.064.687                       |
| 2017  | 5.715.009                            | 1.081.009                       |
| 2018  | 5.840.907                            | 1.096.828                       |
| 2019  | 5.965.410                            | 1.112.081                       |
| 2020  | 5.427.068                            | 1.043.070                       |

Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

1. Menghitung  $T_{\text{tabel}}$

$$\begin{aligned}
 T_{\text{tabel}} &= (\alpha/2; n-1) \\
 &= (0,05/2 ; 10-1) \\
 &= (0,025 ; 120) \\
 &= 2,262
 \end{aligned}$$